

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemenangan liberalisme sebagai tanda memasuki era *post cold war* seperti yang dideskripsikan dan diinterpretasikan Francis Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man* telah mengubah karakteristik dan struktur sistem internasional yang menghasilkan kompleksitas baru dalam hubungan internasional.

Tatanan sistem yang makin kompleks dan masih dalam proses kristalisasinya terjadi berkat revolusi ilmiah dan teknologi yang telah menyatu dengan sistem kapitalisme dan menghasilkan kecenderungan-kecenderungan baru yang secara signifikan mengubah pola interaksi antar bangsa menuju pada bentuk tatanan yang belum pasti antara “globalisasi” dan partikularisme domestik “nasionalisme” (yang bisa jadi merupakan “*Reaction against Globalization*”).<sup>1</sup>

Kecenderungan-kecenderungan baru tersebut antara lain; terjadinya polarisasi kekuatan telah mengubah struktur politik global menjadi semakin multi-polar dan multi-sivisional.<sup>2</sup> Perubahan struktur kekuatan ini ditandai dengan munculnya aktor *non state* khususnya MNC yang semakin menguat

---

<sup>1</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Yayan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Risdakarya, 2005), hlm. 136.

<sup>2</sup> Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and The Remaking of World Order* (London: Touchstone, 1998), hlm. 21.

perannya dalam politik internasional<sup>3</sup> seperti yang dikemukakan kaum pluralis sehingga menciptakan dunia yang cenderung *multicentric* dimana terdapat banyak aktor dalam hubungan internasional termasuk aktor non-negara, dibanding *state centric*.

Disamping itu, isu-isu *low politics* dalam isu keamanan global kontemporer<sup>4</sup> semakin meluas dan mengemuka sejalan dengan dibebaskannya pasar. Penguatan dimensi *low politics* merupakan implikasi dari kebangkitan kesadaran bahwa kerjasama adalah sebuah alternatif dalam mencegah dan menyelesaikan perang menurut kaum liberalis.

Kecenderungan lainnya yaitu munculnya regionalisme baru yang menurut Fawcett didorong oleh; berakhirnya perang dingin, perubahan dalam perekonomian dunia, berakhirnya paham tentang istilah dunia ketiga, serta demokratisasi.<sup>5</sup> Perubahan tersebut telah membangkitkan kesadaran negara-negara di dunia akan pentingnya kerjasama di tataran strategis.

Kemenangan liberalisme merupakan momentum penting bagi arah konstelasi ekonomi politik internasional menuju sebuah pembebasan pasar yang mempengaruhi politik global di era ini. Seperti keyakinan kaum liberalis yang diutarakan Ricardo dan Adam Smith dan John Stuart Mill bahwa semangat perdagangan bebas merupakan alternatif dalam mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian universal<sup>6</sup> dimana merupakan pupuk bagi kerjasama. Pandangan ini dikuatkan oleh pandangan Robert Keohane dan

---

<sup>3</sup> Yulius P. Hermawan, *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 33.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>5</sup> Nurraeni S., Deasy Silvy, Arfin Sudirman, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 20.

<sup>6</sup> Scott Burchill & Andrew Linklater, *Teori-Teori Hubungan Internasional* (terjemahan: M. Sobirin) (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 47.

Joseph Nye dalam *Transnational Relation in World Politics* (1972) bahwa kerjasama adalah efek yang ditimbulkan oleh interdependensi ekonomi<sup>7</sup> yang diciptakan oleh kegiatan perdagangan bebas yang dilakukan aktor negara maupun non-negara (perusahaan multinasional). Oleh karena itu pandangan realis tradisional Morgenthau yang membenarkan perang atas nama politik kekuasaan perlu dipertimbangkan relevansinya dalam konteks dunia yang semakin terintegrasi ini.<sup>8</sup> Kecenderungan berbagai kawasan di dunia dalam regionalisme ekonomi integrasi menjadi bukti dominannya dimensi kerjasama.

Arus ekspansi ekonomi pasar sebagai konsekuensi dibebaskannya pasar yang dipromosikan negara-negara industri dalam rezim ekonomi internasional hasil *Bretton Woods*<sup>9</sup> telah mempercepat penyebaran paham neo-liberalisme yang membuka sistem ekonomi negara-negara berkembang dan akhirnya menciptakan gelombang industrialisasi dan modernisasi<sup>10</sup>, dimana justru berimplikasi pada kecenderungan keseimbangan ekonomi global<sup>11</sup> seperti yang disampaikan Fareed Zakaria dalam bukunya *The Post American World*<sup>12</sup> tentang *the raise of the rest* dimana menuntut adanya tata dunia baru yang lebih adil.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi telah meningkatkan permintaan akan energi sehingga menjadikan *security energy* sebagai bagian

---

<sup>7</sup> Yulius P. Hermawan, *Op.Cit.*, hlm. 6.

<sup>8</sup> Lihat dalam Martin Griffiths, *Fifty Key Thinkers in International Relations* (London & New York: Routledge, 1999), hlm. 36-40.

<sup>9</sup> Adji Samekto, *Kapitalisme Modernisasi dan Kerusakan Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Press, 2008), hlm. 33-37.

<sup>10</sup> Hadi Soesastro, *Untuk Kelangsungan Hidup Bangsa* (Jakarta: CSIS, 1991), hlm. 86-88.

<sup>11</sup> Dalam artikel "*Global Economic Rebalancing This Century*", *Atlantic Sentinel*, <http://atlanticsentinel.com/2011/05/global-economic-rebalancing-this-century/>. Diakses pada 13 Juni 2011.

<sup>12</sup> Fareed Zakaria, *The Post American World* (New York: W. W. Norton & Company, 2008), hlm. 1.

penting dalam isu keamanan global kontemporer abad 21. Upaya-upaya negara dalam mengakses sumber daya energi lewat interaksi internasional menjadi variabel yang menentukan pola-pola hubungan geopolitik yang akan terbentuk. Kompetisi dalam perebutan sumber-sumber energi terutama minyak tidak dapat dihindari. Sehingga peran minyak pun makin signifikan dalam konstelasi politik global.<sup>13</sup>

Perang Teluk I tahun 1991 antara Irak-Kuwait yang melibatkan AS, dilatarbelakangi oleh minyak. Penggunaan *hard power* oleh AS di Irak merupakan respon terhadap rezim yang mengancam kepentingan energi AS dan ini diakui oleh Larry Lindsey<sup>14</sup>, ekonom penasihat ekonomi Presiden George W. Bush. Minyak merupakan salah satu motif dibalik kampanye Bush mengenai *war on terrorism*. Kita juga tidak lupa bagaimana minyak menjadi alat diplomasi ampuh dalam peristiwa embargo minyak AS oleh OPEC tahun 1973 yang mengakibatkan resesi ekonomi dan mengganggu stabilitas ekonomi politik internasional masa itu.

Minyak dunia memiliki peran yang sangat penting bagi sejarah perkembangan dunia karena perkembangan industri minyak dunia sangat berpengaruh signifikan pada perkembangan ekonomi dan politik internasional, khususnya bagi pembangunan negara-negara industri dan negara-negara berkembang dimana sangat membutuhkan minyak mentah dalam jumlah yang

---

<sup>13</sup> Minyak berperan besar dalam sejarah perkembangan peradaban manusia. Secara historis minyak menjadi faktor penting dalam politik khususnya selama periode Perang Dunia I & II serta pasca PD II. Dapat dilihat dalam Qystein Noreng, *Minyak dalam Politik: Upaya Mencapai Konsensus Internasional* (Jakarta: Rajawali, 1983) (terjemahan: Drs. Sahat Simamora), hlm. V-VII. Bandingkan juga dengan Imada Sagita dalam *Global Jurnal Politik Internasional: Krisis Energi*, vol. 8 edisi 2 Mei-November 2006 (Jakarta: Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, 2006) hlm. iv, dimana minyak menjadi *resource of war* di abad 21 yang berimplikasi politis berupa konflik dan instabilitas kawasan.

<sup>14</sup> M Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 36.

besar terutama China. Maka dari itu, perkembangan perminyakan dunia menjadi perhatian bagi setiap negara.

Data EIA menunjukkan minyak adalah sumber energi terbesar kedua di China setelah batu bara yaitu sebesar 19% dari total konsumsi energinya sebesar 85 quadrillion Btu tahun 2008. China diperkirakan mengkonsumsi minyak sebesar 8,3 juta bph tahun 2009, dimana produksi minyak domestiknya diperkirakan mencapai 4,0 juta bph dengan 96% adalah minyak mentah. Minyak impor China mencapai 4,3 juta bph tahun 2009 sehingga menjadikannya sebagai negara importer minyak terbesar kedua di dunia setelah AS. Diprediksikan kebutuhan minyak China akan mencapai 9,6 juta bph tahun 2011.<sup>15</sup>

Minyak merupakan elemen penting yang membentuk *national power* dan menjadi instrumen dalam kebijakan luar negeri untuk mencapai *national interest* dan memperbesar kapabilitas *power* negara. Karakteristiknya yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*) dan terbatas membuat minyak berpotensi menjadi faktor pendorong kerjasama antar negara sekaligus faktor pemicu konflik dan ketegangan internasional yang mengancam stabilitas keamanan dunia. Karena posisinya yang strategis, maka dalam politik internasional, minyak dapat menjadi senjata diplomasi yang ampuh.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> "Country Analysis Briefs", *US Energy Information and Administration (EIA)*, <http://www.eia.gov/EMEU/cabs/China/pdf.pdf>. Diakses pada 10 Mei 2011.

<sup>16</sup> Minyak sebagai senjata diplomasi dalam menyelesaikan persoalan ketimpangan pembangunan antara negara industri dan negara berkembang dapat dilihat dalam Bachrawi Sanusi, *Minyak Bumi Energi dan Diplomasi* (Jakarta: Alko Utama Offset, 1982). Baca juga dalam Daniel Yergin, *The Prize: The Epic Quest for Oil, Money, and Power* (New York: Simon & Schuster, 2008), hlm. xv, mengenai signifikansi minyak era *post cold war* yang dimanfaatkan aktor negara mempengaruhi struktur internasional yang terbentuk, serta bagaimana minyak dapat mempengaruhi ketegangan dalam pasar internasional dan interaksi dari kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dengan

Konsekuensi dari kegiatan ekonomi modern yaitu makin meningkatnya penggunaan energi dalam jumlah besar. Akan tetapi dalam sistem internasional tidak dapat ditepisakan kenyataan bahwa sumber-sumber konflik dalam politik internasional tidak dapat dihindari dan cenderung lahir dari ketidakadilan distribusi nilai-nilai ekonomi yang menjadi bagian *national power* suatu negara agar dapat survive. Energi menjadi faktor kunci bagi berjalannya industrialisasi dan urbanisasi dalam konsep peradaban modern dan menyebabkan sumber-sumber energi semakin dieksploitasi. Dapat dikatakan bahwa energi merupakan faktor penentu yang menggerakkan ekonomi global saat ini.<sup>17</sup>

Menurut Michael Klare, sumber konflik pasca Perang Dingin bukanlah kebudayaan seperti yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington, melainkan perebutan akses terhadap sumber daya alam salah satunya minyak bumi. Di abad ke-20 minyak dan sumber mineral adalah salah satu sumber konflik akan tetapi di abad ke-21 minyak bumi menjadi sumber konflik paling penting di banding sumber-sumber lainnya.<sup>18</sup>

Pertumbuhan konsumsi energi dunia sejak tahun 1990 hingga 2007 mengalami peningkatan yaitu dari 355 menjadi 495 quadrillion btu (lihat gambar 1.1 Pertumbuhan Konsumsi Energi) dan didominasi oleh negara *emerging economy* seperti China dan India. Peningkatan konsumsi energi dunia diprediksikan meningkat menjadi 1,4% pertahun dari 2007 hingga

---

kompetisi ekonomi yang semakin tinggi, maka minyak menjadi elemen penting dari *national power* negara modern.

<sup>17</sup> Philip Connelly dan Robert Perlman, *The Politics of Scarcity: Resources Conflicts in International Relation* (Oxford: Oxford University Press, 1975), hal. 26ff, dalam M Kholid Syeirazi, *Di Bawah Bendera Asing: Liberalisasi Industri Migas di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2009), hlm. 29.

<sup>18</sup> M Kholid Syeirazi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

2035.<sup>19</sup> Peningkatan konsumsi energi ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi pertahun kelompok non-OECD lebih dominan dan diprediksi meningkat<sup>20</sup> menjadi 4,4% pertahun dari 2007 hingga 2035 (lihat gambar 1.2 Pertumbuhan GDP Dunia (OECD & Non-OECD)).

Dinamika pertumbuhan ekonomi dunia yang tinggi serta ledakan penduduk yang didominasi negara-negara berkembang khususnya di kawasan Asia, menyebabkan tingginya permintaan minyak dunia. Diprediksikan permintaan minyak dunia akan mencapai 89,9 juta bph di tahun 2014 dimana meningkat sebesar 5,4 juta bph per tahun sejak 2009.<sup>21</sup>

Dinamika perkembangan politik bisnis minyak internasional sejak berdirinya OPEC tahun 1960 dikarakteristikan dengan kompetisi dan perebutan kontrol atas rantai *supply* dan *demand*. Persaingan *power* secara politis dan ekonomis terjadi dalam hubungan negara produsen dan konsumen serta antara negara-negara konsumen besar dimana hal ini sejalan dengan pemikiran realisme tentang politik internasional yang senantiasa diwarnai oleh perebutan kekuasaan dan kontrol.<sup>22</sup> Argumen ini diperkuat oleh paradigma neo-klasik yang melihat mekanisme pasar sebagai arena kompetisi yang cenderung monopolistik (Djojohadikusumo. 1991: 100)<sup>23</sup>, dimana selalu terjadi tarik menarik kepentingan antar produsen dan konsumen.

---

<sup>19</sup> "International Energy Outlook 2010", US Energy Information and Administration (EIA), [http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484\(2010\).pdf](http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/pdf/0484(2010).pdf), hlm. 19-20. Diakses pada 11 April 2011.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>21</sup> "World Oil Outlook", Organization of The Petroleum Exporting Country (OPEC), [http://www.opec.org/opec\\_web/static\\_files\\_project/media/downloads/publications/WOO\\_2010.pdf](http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/WOO_2010.pdf), hlm. 75. Diakses pada 20 April 2011.

<sup>22</sup> Marthin Griffiths, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>23</sup> Yanuar Ikbar, *Ekonomi Politik Internasional I: Konsep dan Teori* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 47.

Salah satu faktor penting dalam politik bisnis minyak internasional adalah harga minyak, karena naiknya harga minyak dunia sangat berpengaruh terhadap konstelasi ekonomi politik internasional. Dampak-dampak kenaikan harga minyak dunia, seperti yang terjadi tahun 2008 menyebabkan inflasi yang tinggi dan kenaikan harga komoditas internasional khususnya harga pangan yang berpengaruh langsung pada stabilitas ekonomi politik negara. Harga minyak sejak tahun 2003 naik dari \$27 per barel menjadi \$70 per barel tahun 2007 dan mencapai puncak tertinggi tahun 2008 yaitu lebih dari \$140 barel akibat krisis finansial di AS. Hal ini berbeda dengan periode 1986-2003 dimana harga masih berkisar \$25 per barel.<sup>24</sup> Kenaikan harga ini disebabkan oleh ketidakseimbangan *supply* dan *demand* yang lebih dipicu faktor non-fundamental.<sup>25</sup>

Dampak dari konstelasi industri minyak internasional seperti yang dipaparkan di atas yaitu memicu diterapkannya strategi diversifikasi dan konservasi dengan memperluas kontrol baik dalam hal harga minyak maupun akses ke sumber minyak yang potensial pada kebijakan energi tiap negara, sehingga suasana kompetisi yang ekspansionis baik antar negara produsen dan konsumen maupun antar negara-negara konsumen dalam politik bisnis minyak internasional sulit dihindari.

Dengan demikian, kecenderungan orientasi kebijakan energi tiap negara akan semakin pragmatis dan oportunistis dimana kepentingan ekonomi nasional telah berintegrasi dengan kepentingan geopolitik dalam mencapai

---

<sup>24</sup> "Are High Oil Prices Here To Stay?", *Asian Development Bank (ADB)*, <http://www.adb.org/Documents/Books/ADO/2008/update/Part02-Oil.pdf>, hlm. 1. Diakses pada 12 Maret 2011.

<sup>25</sup> "Faktor Non Fundamental Pemicu Utama Kenaikan Harga Minyak Dunia" edisi 15 Mei 2008, dalam [www.esdm.go.id/berita/migas.html](http://www.esdm.go.id/berita/migas.html). Diakses pada 25 September 2008.

*relative gain* dan kekuasaan secara bersamaan dengan kompleksitas dan ketegangan dalam hubungan geopolitik sebagai konsekuensinya.

Transformasi ekonomi China merupakan konsekuensi dari revolusi kebudayaan dan reformasi politik tahun 1966-1976.<sup>26</sup> Sistem ekonomi yang mengadopsi gaya kapitalisme Adam Smith dalam sistem China yang sosialis atau yang lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar sosialis<sup>27</sup>, membuatnya bangkit menjadi salah satu *major power* dan bahkan diprediksi akan menggeser AS sebagai negara *super power* di bidang ekonomi tahun 2035.<sup>28</sup> Pertumbuhan ekonomi China kini mencapai 9,7% dan menggeser Jepang sebagai ekonomi kedua terbesar di dunia<sup>29</sup> berkat kebijakan liberalisasi dan politik industrialisasi yang diterapkan sebagai strategi pembangunan ekonominya.

Ekonomi China yang didukung dengan kekuatan populasi 1,3 milyar lebih ini mampu mentransformasi dan menggeser pusat kekuatan ekonomi global dari Eropa ke Asia Pasifik lewat dominasi China di bidang investasi, pasar dan industri serta kekuatan budaya bisnis perusahaan.<sup>30</sup> China berhasil menjadi pusat manufaktur perusahaan besar dunia, dan mengalami surplus perdagangan besar dengan AS ditambah dengan kekuatan pertahanan militer yang semakin modern, membuat China memiliki *bargaining position* yang tinggi dalam arena percaturan politik global.

---

<sup>26</sup> Lihat dalam Mari Pangestu, Sjahrir, Ari A. Perdana, *Indonesia dan Tantangan Ekonomi Global* (Jakarta: CSIS, 2003), hlm. 258-260.

<sup>27</sup> Lihat dalam Aa Kustia Sukarnaprawira, *China: Peluang atau Ancaman* (Jakarta: Restu Agung, 2009), hlm. 47.

<sup>28</sup> *The Economist* edisi 10 Januari 2011, "How to Gracefully Step Aside", <http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/01/china>. Diakses pada 14 Januari 2011.

<sup>29</sup> *BBC News* edisi 14 Februari 2011, *China Overtakes Japan to Become World's Second Economy*, <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-12445927>. Diakses pada 18 Mei 2011.

<sup>30</sup> Lihat dalam Pete Engardio, *Chindia: Strategi China dan India Menguasai Bisnis Global* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 1-27.

Keberhasilan China dalam transformasi ekonominya tidak lepas dari peran sektor energi khususnya minyak yang membuat roda perekonomian China tetap berjalan dan berkembang sampai hari ini. Oleh karena itu, *energy security* yang diterjemahkan dalam kebijakan energi China menjadi sangat penting dan mendapat kontrol kuat dari negara. Mengemukanya isu *energy security* yang dilatarbelakangi oleh krisis energi telah mengembalikan signifikansi peran negara dalam hubungan internasional era *post cold war*<sup>31</sup>.

China mendefinisikan *energy security* sebagai kestabilan harga minyak dan keamanan suplai atau pasokan minyak.<sup>32</sup> Ketidakmampuan sumber minyak domestik dalam memenuhi kebutuhan minyak yang tinggi menjadi persoalan bagi *energy security* China yang tentunya menghambat pertumbuhan ekonomi (lihat gambar 1.3 Produksi dan Konsumsi Minyak China). Kondisi ladang minyak besar di China seperti Daqing dan Shengli sejak tahun 1960an sulit untuk dieksplorasi.<sup>33</sup> Selain itu, cadangan terbukti China pun tidak mampu memenuhi kebutuhannya dalam waktu mendatang, dimana diprediksikan permintaan China akan minyak liquid

---

<sup>31</sup> Lihat dalam Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak Cina di Indonesia* (Depok: Kepik Ungu, 2010), hlm. 13. Disini dijelaskan juga dinamika *energy security* China sejak awal reformasi ekonomi tahun 1978 yang mendapat kontrol kuat dari negara, menunjukkan signifikannya faktor energi ini bagi politik industrialisasi China. Dalam era *post cold war*, isu krisis energi kembali menjadi isu sentral dalam keamanan non-tradisional yang menjadi bagian dari *national security* negara modern, sehingga memicu bangkitnya kembali peran aktor negara yang kuat dalam memformulasi dan mengimplementasikan kebijakan energi yang efektif. Untuk selengkapnya tentang keamanan energi dan peran negara, baca Bob Sugeng Hadiwinata, *Bringing the State Back In: Energy and National Security in Contemporary International Relations* dalam *Global Jurnal Politik Internasional: Krisis Energi, Op.Cit.*, hlm. 1-10.

<sup>32</sup> Evan. S. Medeiros, *China's International Behaviour: Activism, Opportunism, and Diversification*, [http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND\\_MG850.pdf](http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG850.pdf), hlm. 71. Diakses pada 1 April 2011.

<sup>33</sup> "Country Analysis Briefs", *US Energy Information and Administration (EIA), Op.Cit.*, hlm. 4.

meningkat sebesar 17 juta bph tahun 2035, sedangkan cadangan minyak terbukti China sekarang hanya mencapai 20,4 milyar barel.<sup>34</sup>

Kondisi ini menyebabkan China harus mengimpor minyak dari luar negeri. China telah menjadi negara pengimpor minyak sejak tahun 1993 sebagai dampak dari kekuatan ekonomi yang terus tumbuh yang menyebabkan tingginya permintaan minyak sehingga menciptakan ketergantungan.<sup>35</sup>

Impor minyak China tahun 2006 sebesar 3,5 juta bph dan diprediksikan akan meningkat menjadi 13,1 juta bph tahun 2030.<sup>36</sup> Impor minyak China berasal dari kawasan Timur Tengah, Asia Tengah, Afrika, Amerika Latin dan Rusia. China mengimpor minyak sebesar 4 juta bph dimana 50% atau 2 juta barel minyak impornya berasal dari Timur Tengah, 30% dari Afrika atau sebesar 1,2 juta barel, 5% dari Asia Pasifik yaitu 184.000 barel, dan 17% dari negara-negara lain atau sebesar 686.000 barel.<sup>37</sup> Ketergantungan ini menyebabkan posisi China secara geopolitis semakin rentan terhadap ketegangan dan konflik. Oleh karena itu, China melakukan diversifikasi dalam sumber pasokan minyak luar negeri untuk mengurangi ketergantungannya pada satu wilayah kawasan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>35</sup> Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm.45-46.

<sup>36</sup> "World Energy Outlook 2007", *International Energy Agency (IEA)*, [http://www.iea.org/papers/2007/fs\\_china.pdf](http://www.iea.org/papers/2007/fs_china.pdf). Diakses pada 4 Februari 2011.

<sup>37</sup> "Country Analysis Brief : China ", *Energy Information Administration*, November 2010, <http://www.eia.gov/EMEU/cabs/China/pdf.pdf>. Diakses pada 10 Mei 2011.

<sup>38</sup> Ketergantungan China terhadap minyak impor dapat memicu tekanan politik, apalagi dikawasan Timur Tengah pengaruh AS sangat besar . Oleh karena itu, China mau tidak mau mesti melakukan diversifikasi sumber pasokan, agar mengurangi ketergantungannya pada satu wilayah. Ketergantungan pada satu wilayah akan membuat China semakin rentan dengan gangguan *supply*, instabilitas politik dalam negara produsen dan fluktuasi harga minyak yang mengancam *national security* China. Untuk lebih jelas lihat dalam *China Quest for Energy*, *RAND*, [http://www.rand.org/pubs/monograph\\_reports/MR1244.html](http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1244.html), 1 April 2011. Bandingkan dengan konsep *energy security* menurut Mason Willrich dalam *Global Jurnal Politik Internasional: Krisis Energi*, *Op.Cit.*, hlm. 2, dimana salah satu komponen utama dalam menjamin *energy security* adalah melalui kebijakan diversifikasi sumber energi dan wilayah pasokan.

Pada era Mao kebijakan energi China diorientasikan pada *self-sufficiency* sebagai bagian dari semangat nasionalis rezim dan ditujukan untuk mengantisipasi ketergantungan kebutuhan maupun pengelolaan energi terhadap pihak asing.<sup>39</sup> Saat ini permintaan minyak China meningkat dari 7,6 juta bph tahun 2007 menjadi 9,8 juta bph tahun 2011 (lihat gambar 1.4 Permintaan Minyak China).

Strategi energi China yang digunakan yaitu konservasi, ekspansi dan diversifikasi energi. China menandatangani kontrak-kontrak jangka panjang dan menanamkan investasi besar dalam eksplorasi minyak baik di dalam maupun luar negeri sebagai upayanya memenuhi kebutuhan minyak dalam negeri dan juga strategi dalam memenangkan kompetisi dengan perusahaan dari negara-negara lain.

Lima kebijakan pemerintah China soal *energy security* berdasarkan *White Paper on National Program on Mineral Resource* tahun 2001 yaitu:

1. Investasi besar-besaran di proyek eksplorasi dan pengembangan di berbagai negara.
2. Membangun *Strategic Petroleum Reserve*.
3. Meningkatkan kapasitas kilang dalam negeri untuk mengolah minyak mentah yang diimpor dari Timur Tengah sehingga menekan biaya pengolahan dan tidak perlu membeli minyak olahan.

---

<sup>39</sup> Goodman, Peter. S, "*Big Shift in China's Oil Policy: With Irak Deal Dissolved by War Beijing Looks Elsewhere*", diakses <http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article, 5/10/2009> 13:35, dalam Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 44.

4. Mengembangkan industri gas alam domestik sebagai sumber energi selain minyak bumi.
5. Mengembangkan lapangan minyak dalam negeri dengan mengundang pihak-pihak asing dalam proyek eksplorasi dan pengeboran di China.<sup>40</sup>

Diantara kebijakan tersebut, yang paling menekankan peran NOC China adalah kebijakan SPR (*Strategic Petroleum Reserve*). Selain digunakan untuk mengamankan pasokan energi domestik China guna menjamin berlangsungnya pertumbuhan ekonomi, kebijakan ini dipakai untuk mengantisipasi krisis energi yang pernah terjadi di China tahun 2003/2004. Kebijakan ini biasa digunakan negara-negara industri maju dalam meningkatkan perekonomian mereka dengan menjamin ketersediaan energi.

Menurut Dwijaya Kusuma, bagi China pembangunan SPR diperlukan untuk:

1. Mengurangi ketergantungan terhadap negara Timur Tengah serta mengantisipasi pergolakan di kawasan Timur Tengah dan Afrika.
2. Membantu mengendalikan harga minyak di pasar internasional.
3. Menghalangi/mencegah gangguan akibat instabilitas ekonomi dan politik.
4. Meningkatkan peran China di dunia internasional.<sup>41</sup>

Oleh karena itu, melihat peran energi yang strategis dalam konsep *national security* dan kepentingan nasional China dikaitkan dengan peran

---

<sup>40</sup> Wibowo, Ignatius dan Syamsul Hadi, "*Merangkul Cina*", PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2009, hal.178, dalam Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 48-49.

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 50.

globalnya saat ini, maka peran perusahaan minyak nasional China sebagai instrumen negara dalam menjamin keamanan energi China khususnya minyak sangat signifikan bagi tercapainya prioritas kebijakan luar negeri China yaitu pembangunan ekonomi.

Kelahiran NOC (*national oil company*) yang dilatarbelakangi oleh kepentingan negara untuk memenuhi pasokan minyak domestik guna menopang pembangunan dan menciptakan kesejahteraan rakyat dan faktor kepentingan politik strategis, menegaskan kembali bangkitnya politik neo-merkantilisme atau yang disebut Ian Bremmer sebagai kapitalisme negara<sup>42</sup> dalam ekonomi politik internasional. Dalam konteks politik bisnis minyak internasional, NOC China merupakan representasi serta instrumen negara dalam mencapai kepentingan ekonomi politiknya.<sup>43</sup>

Peran NOC pun semakin meluas, tidak hanya memperjuangkan kepentingan geo-ekonomi China, NOC China juga melakukan fungsi pembangunan sosial seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur publik dalam negeri seperti yang diutarakan McPershon<sup>44</sup>, dan bahkan fungsi politik strategis.

Sebagai sebuah perusahaan, NOC juga melakukan peran bisnisnya dengan menjual hasil produksi minyak guna memperoleh keuntungan yang

---

<sup>42</sup> Lihat dalam Ian Bremmer, *Akhir Pasar Bebas* (terjemahan: Alex Tri Kantjono Widodo) (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 55-58.

<sup>43</sup> Selain sebagai instrumen dalam menjamin *energy security* China, NOC China juga menjadi kendaraan politik yang dipakai oleh negara untuk memperoleh *leverage politic* dan *bargaining position* yang lebih besar ditataran regional dan internasional (Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 167.). Ian Bremmer menggunakan istilah kapitalisme negara (*state capitalism*) yang melihat pasar sebagai alat untuk melayani kepentingan nasionalnya dengan perusahaan minyak dan gas nasional (NOC) sebagai salah satu kepanjangan tangan (*intermediary institution*) negara dalam menanamkan pengaruhnya. Untuk selengkapnya baca dalam Ian Bremmer, *Op.Cit.*, hlm. 55-65. Praktek ini biasa dikenal dengan paradigma neo-merkantilisme.

<sup>44</sup> Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 41.

digunakan untuk memperbesar kapasitas dan kinerja perusahaan. Kepentingan korporasi akan semakin menonjol dalam konteks perdagangan akan tetapi dalam konteks keamanan dan kelancaran pasokan, negara memiliki kepentingan lebih dominan. Bantuan dari bank nasional China, kontrol pemerintah dalam struktur organisasi NOC China merupakan indikator intervensi dan dominasi negara yang kuat di bidang energi. Disini terlihat bagaimana paradigma neo-merkantilisme membentuk kebijakan energi China.

CNPC (*China National Petroleum Company*), SINOPEC (*China Petroleum and Chemical Company*) dan CNOOC (*China National Offshore Oil Company*) adalah NOC China yang mempunyai peran utama mengeksekusi kebijakan energi China guna memastikan ketersediaan minyak yang cukup bagi berjalannya roda perekonomian negara.<sup>45</sup>

NOC China yang terbesar dalam produksi dan suplai minyak yaitu CNPC yang berdiri sejak 1988. Kegiatan utama CNPC ada pada sektor *upstream* yaitu eksplorasi serta produksi minyak dan gas, serta *mid-downstream* yaitu kegiatan penyulingan, pengolahan migas, distribusi dan pemasaran.

Signifikansi CNPC sebagai mesin pemasok energi khususnya minyak, dibuktikan dengan peringkat ke-4 dalam top 20 produsen minyak tahun 2008 versi PIW (*Petroleum Intelligence Weekly*).<sup>46</sup> Majalah *Fortune*

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 51. Ketiga BUMN tersebut adalah instrumen China dalam mewujudkan kebijakan SPR dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan eksplorasi minyak ke seluruh dunia. Bandingkan juga dengan tulisan ini "*Chinese NOCs and World Energy Markets: CNPC, SINOPEC and CNOOC*", *The Baker Institute Energy Forum*, [http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC\\_CNOOC\\_Lewis.pdf](http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC_CNOOC_Lewis.pdf), diakses pada 29 April 2011.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

menempatkan CNPC dalam peringkat ke-39 dari 500 perusahaan minyak dunia berdasarkan *sales revenue* tahun 2006.<sup>47</sup>

Robert Pirog membuat 10 peringkat produsen minyak terbaik dunia berdasarkan kriteria produksi, cadangan minyak, dan investasi yang menempatkan CNPC di urutan ke-7 dan urutan ke-4 dalam peringkat 10 perusahaan terbesar dalam investasi sektor hulu.<sup>48</sup> CNPC meraih keuntungan bersih sebesar RMB 91,65 milyar atau US\$ 13,196 milyar. Produksi minyak domestik CNPC mencapai 108,25 *million metric tons* (mmt) sementara produksi dari luar negeri mencapai 62,20 mmt dan dari jumlah tersebut CNPC memasok 30,50 mmt minyak mentah ke Cina.<sup>49</sup>

Peran ekonomi politik CNPC adalah menjamin stabilnya pasokan minyak China dari dalam dan luar negeri yang berarti kelancaran eksplorasi, produksi dan distribusi. Eksistensi dan signifikansi peran CNPC bagi kepentingan ekonomi nasional China akan dihadapkan pada tantangan-tantangan berupa persaingan bisnis internasional dalam hal kontrol pasar dan wilayah minyak yang potensial.

Situasi keamanan energi di Asia Pasifik sangat rentan terhadap ketidakstabilan. Konsekuensi dari peningkatan pertumbuhan GDP per kapita Asia Pasifik yang tinggi (lihat gambar 1.5 Pertumbuhan Rata-Rata GDP Perkapita APEC) dalam dua dekade terakhir, menyebabkan permintaan energi semakin meningkat. Permintaan energi Asia Pasifik yang paling tinggi yaitu di

---

<sup>47</sup> "China's NOC and World Energy Markets: CNPC, SINOPEC and CNOOC", *The Baker Institute Energy Forum*, [http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC\\_CNOOC\\_Lewis.pdf](http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC_CNOOC_Lewis.pdf), hlm. 15, diakses pada 29 April 2011.

<sup>48</sup> Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 31-33.

<sup>49</sup> *CNPC Annual Report 2008*, <http://www.cnpc.com.cn/en>, hlm. 109. Diakses pada 3 Februari 2010.

sektor minyak (lihat gambar 1.6 Permintaan Energi APEC Menurut Jenisnya).<sup>50</sup>

Pada tahun 2005, kawasan APEC mengimpor minyak sebesar 34%. Pada tahun 2030 diprediksikan impor minyak akan meningkat menjadi sekitar 45%. Kondisi produksi yang konstan membuat negara APEC tergantung terhadap minyak impor (lihat gambar 1.7 Produksi dan Impor Minyak APEC). Meningkatnya ketergantungan pada minyak impor menimbulkan ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi dan *energy security* kawasan Asia Pasifik.<sup>51</sup>

Sejak tahun 1990, produksi minyak di wilayah APEC tetap konstan, sementara permintaan minyaknya meningkat. Akibatnya impor minyak kawasan APEC tumbuh lebih cepat daripada permintaan. Tren ini akan terus berlanjut hingga tahun 2030, dimana kawasan Asia Pasifik menjadi lebih tergantung pada minyak impor dari luar kawasan.<sup>52</sup>

Resiko ketergantungan ini bagi ekonomi negara APEC diantaranya:

1. Ketersediaan pasokan minyak bisa terancam oleh krisis dan gejolak politik di wilayah lain, seperti Timur Tengah dan Afrika.
2. Ketersediaan pasokan minyak akan tergantung pada kemampuan perusahaan minyak nasional dan multinasional untuk membuat investasi yang memadai di wilayah lainnya.

---

<sup>50</sup> Hasil analisis APERC tahun 2009 dalam “*APEC Energy Demand and Supply Outlook 4th Edition*”, APERC (Asia Pacific Energy Research Centre), [http://www.ieej.or.jp/aperc/2009pdf/Outlook/Outlook\\_Volume\\_I\\_4E.pdf](http://www.ieej.or.jp/aperc/2009pdf/Outlook/Outlook_Volume_I_4E.pdf), hlm. 13. Diakses pada 30 Juni 2011. Peningkatan paling signifikan terjadi di negara ekonomi berkembang salah satunya China (Global Jurnal Politik Internasional: *Krisis Energi, Op.Cit.*, hlm. 2.)

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

3. Karena produksi minyak lebih terkonsentrasi di sedikit negara, harga minyak akan semakin dipengaruhi oleh kekuatan pasar dari negara produsen.

4. Pengiriman minyak dalam jumlah besar dengan jarak yang jauh, biasanya dari Timur Tengah atau Afrika, menimbulkan beberapa resiko keamanan.

Dengan demikian kemungkinan hasil dari ketergantungan minyak impor ini yaitu:

- Volatilitas harga minyak akan semakin berlanjut.
- Resiko yang signifikan dalam gangguan pasokan.
- Kedua hal di atas akan mengancam stabilitas ekonomi APEC dan

dunia.<sup>53</sup>

AS merupakan kompetitor terbesar China karena AS merupakan negara importir minyak terbesar yaitu 9,6 juta bph. Karena itu, eksistensi pengaruh AS di kawasan minyak yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan pasokan minyak China. Selain AS, China juga dihadapkan dengan negara-negara besar pengonsumsi minyak di Asia Pasifik. Negara importer minyak terbesar di Asia Pasifik yaitu AS, China, Jepang, India, dan Korea Selatan (lihat gambar 1.8 Sepuluh Negara Pengimpor Minyak Terbesar Dunia). Kelima negara importer ini merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta memiliki populasi yang besar khususnya China dan India. Oleh karena itu, persaingan China dengan negara-negara konsumen minyak terbesar di Asia Pasifik pun tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

kebutuhan dan ketergantungan China yang tinggi terhadap minyak impor serta kondisi keamanan energi Asia Pasifik (lihat tabel 1.1 Lima Belas Negara Pengekspor Minyak Terbesar di Dunia & tabel 1.2 Lima Belas Negara Produsen Minyak Terbesar di Dunia).

Berdasarkan gambaran besar tentang kondisi *energy security* di Asia Pasifik dari data diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kompleksitas geopolitik minyak Asia Pasifik akan ditentukan oleh hubungan antar negara produsen dan konsumen serta hubungan antar negara konsumen minyak di Asia Pasifik.

Ketergantungan negara-negara Asia Pasifik terhadap minyak impor di luar kawasan di respon negara-negara konsumen minyak dengan strategi diversifikasi khususnya sumber pasokan dalam menjamin *energy security* mereka.<sup>54</sup> Kondisi tersebut mendorong diterapkannya paradigma neo-merkantilisme dalam kebijakan energi negara-negara konsumen yang memperuncing suasana kompetisi di kalangan *major power* di Asia Pasifik dimana pendekatan politis, diplomatik dan militer<sup>55</sup> digunakan untuk

---

<sup>54</sup> Mason Willrich dalam bukunya *Energy and World Politic* (1978) menyatakan diversifikasi sumber pasokan dan jenis energi merupakan salah satu dari tiga komponen kebijakan energi yaitu mereduksi konsumsi energi dan memperbesar cadangan energi domestik untuk mengurangi ketergantungan minyak impor dalam menjamin *energy security*, (Global Jurnal Politik Internasional: *Krisis Energi, Op.Cit.*, hlm. 2.). Bandingkan dengan pendapat Mikkal E. Herberg tentang beragam respon kebijakan negara-negara di Asia Pasifik terhadap *energy insecurity* di kawasan yang cenderung neo-merkantilis dan kompetitif, dalam “*Asia’s Energy Insecurity: Cooperation or Conflict?*”, *NBR (The National Bureau of Asian Research)*, [http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkms1.isn.ethz.ch%2Fserviceengine%2Ffiles%2FISN%2F29359%2Fchaptersection\\_singledocument%2Fddbfeff-d366-4390-b7b2-bd7355c373d8%2Fen%2Fenergy\\_insecurity\\_cooperation.pdf&rct=j&q=PDF%20Asia%2E%80%99s%20Energy%20Insecurity%3A%20Cooperation%20or%20Conflict%3F%2E%80%9D%2C%20%20%20%20%20%20&ei=dBUSTsLVOqf4mAWrze3lBg&usg=AFQjCNHZ\\_318az8YZWm uwvgR18tK6MoKHg&cad=rja](http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=3&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fkms1.isn.ethz.ch%2Fserviceengine%2Ffiles%2FISN%2F29359%2Fchaptersection_singledocument%2Fddbfeff-d366-4390-b7b2-bd7355c373d8%2Fen%2Fenergy_insecurity_cooperation.pdf&rct=j&q=PDF%20Asia%2E%80%99s%20Energy%20Insecurity%3A%20Cooperation%20or%20Conflict%3F%2E%80%9D%2C%20%20%20%20%20%20&ei=dBUSTsLVOqf4mAWrze3lBg&usg=AFQjCNHZ_318az8YZWm uwvgR18tK6MoKHg&cad=rja). Diakses pada 10 Februari 2011.

<sup>55</sup> Negara industri besar seperti AS dan China cenderung menggunakan kekuatan militer untuk melindungi pasokan energi khususnya minyak. Hubungan politik China dengan negara-negara Asia Tengah yang potensial akan cadangan minyak, dalam organisasi SCO (*Shanghai*

memperkuat kontrol terhadap akses minyak. Seperti yang dinyatakan Stephen Enke bahwa merkantilisme melihat kemakmuran negara sebagai keamanan nasional yang perlu dicapai dengan intervensi negara yang lebih dominan<sup>56</sup>. Selain itu, diupayakan pendekatan multilateral (institusional) dalam lembaga regional dan interregional seperti yang sedang dipromosikan oleh ASEAN dan APEC dalam kerjasama regional di bidang keamanan energi, juga inisiatif di beberapa negara besar Asia Pasifik untuk merintis pembangunan pipa gas.<sup>57</sup>

Meskipun upaya multilateral ini penting dalam menciptakan kerjasama regional di bidang energi dan mengurangi kompetisi dalam perebutan sumber pasokan minyak yang strategis, namun saat ini kecenderungan yang terjadi adalah sebaliknya keamanan energi di Asia Pasifik direspon dengan pendekatan neo-merkantilisme yang menghasilkan sebuah *zero sum game* dimana sangat berpotensi menjadi sumber konflik dan ketegangan dalam kawasan.<sup>58</sup> Pola yang terbentuk dalam hubungan antar konsumen terlihat dari persaingan antar perusahaan minyak nasional (NOC) dari negara-negara di Asia Pasifik<sup>59</sup> (melalui aktivitas dan ekspansi yang

---

*Corporation*) merupakan *strategic partnership* yang dibangun China guna mencapai kepentingannya akan sumber energi di kawasan tersebut. Bagaimana AS menjadikan negara di kawasan ini sebagai basis militer sebagai upaya kebijakan *counter terrorism*-nya dapat menjadi pemicu ketegangan China dengan AS. Bisa juga dianalisa hubungan diplomatik antara Junta Militer Myanmar dengan China. Untuk selengkapnya tentang upaya-upaya tersebut baca dalam *Indonesia dan Isu-Isu Global*, CSIS, (Jakarta: CSIS, 2007), hlm. 74-91. Bisa dibandingkan dengan analisis Mikkal E. Herberg dalam "*Asia's Energy Insecurity: Cooperation or Conflict?*", *Op.Cit.*, hlm. 364-369, tentang ketegangan antar *major powers* di Asia Pasifik dalam isu keamanan energi serta peluang kerjasama dalam menyelesaikannya secara kolektif.

<sup>56</sup> Lihat dalam Yanuar Ikbar, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>57</sup> Lihat analisis Mikkal E. Herberg tentang kecenderungan konflik yang dihasilkan dari nasionalisme energi berupa persaingan di Asia Pasifik dalam "*Asia's Energy Insecurity: Cooperation or Conflict?*", *NBR, Op.Cit.*, hlm. 369.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 367. Lihat juga pembahasan singkat tentang peran NOC dalam kajian ekonomi politik internasional dalam Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 41-42, serta bandingkan dengan latarbelakang lahirnya NOC dan posisinya di abad 21 dalam "*National Oil Company: What Role Can They/Should They Play in An Age of Liberalized Markets,*

mendapat dukungan dari negara) untuk menguasai dan mengamankan akses pasokan minyak di wilayah strategis seperti Timur Tengah, Rusia, Asia Tengah, Teluk Persia dan Afrika.

Implikasi dari pola interaksi dalam geopolitik minyak Asia Pasifik ini mengancam stabilitas keamanan kawasan karena signifikansi *energy security* bagi sektor ekonomi, politik dan pertahanan khususnya bagi negara-negara *emerging economy* Asia Pasifik, mempengaruhi isu *high politic* khususnya soal persebaran nuklir dan konflik teritorial serta isu degradasi lingkungan akibat aktivitas perusahaan minyak, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan kawasan sehingga berdampak langsung terhadap *national* dan *regional security*.

Dalam menyikapi *energy insecurity* tersebut, pilihan strategi kebijakan energi China akan menentukan apakah akan terbentuk konstelasi yang semakin memperkuat kerjasama regional atau sebaliknya kompetisi yang mengarah pada ketegangan dan konflik, mengingat posisi China saat ini sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang berpengaruh di dunia. Dalam konteks ini, kerjasama di bidang politik energi dalam organisasi regional semakin dituntut signifikansi perannya dalam konstelasi geopolitik minyak Asia Pasifik.

Kontrol dan dukungan kuat yang dipertahankan pemerintah China dalam perusahaan minyak nasionalnya, menandakan upaya China

---

*Globalization?*", *The Baker Institute Energy Forum*, [http://www.rice.edu/energy/research/nationaloil/docs/EdMorse\\_050505.pdf](http://www.rice.edu/energy/research/nationaloil/docs/EdMorse_050505.pdf), hlm. 12-21. Diakses pada 21 April 2011. Bandingkan juga dengan artikel ini "*The Role of National Oil Companies in International Energy Markets*", *The Baker Institute Energy Forum*, <http://www.rice.edu/energy/research/nationaloil/index.html>. Diakses pada 21 April 2011, dimana investasi strategis dan aliansi perdagangan yang dilakukan NOC lebih dipengaruhi oleh faktor geopolitik daripada pertimbangan ekonomi.

menggunakan NOC-nya sebagai instrumen dalam mencapai kepentingan nasionalnya dalam politik bisnis minyak internasional dimana kepentingan geo-ekonomi China telah berintegrasi dengan kepentingan geopolitis.

Upaya China bangkit menjadi sebuah *major power* mencerminkan integrasi dari kepentingan politis dan ekonomi China yang saling berkaitan dan mempengaruhi. Hal ini tercermin dalam perilaku internasionalnya yang dipengaruhi oleh faktor historis salah satunya yaitu revitalisasi nasional China yang mana dituangkan dalam prioritas diplomasi China dalam hubungan internasionalnya seperti yang dinyatakan oleh Evan S. Medeiros dalam karya ilmiahnya “*China’s International Behaviour: Activism, Opportunism and Diversification*” yaitu *protecting its sovereignty and territorial integrity, promoting economic development, and generating international respect and status*.<sup>60</sup> Faktor tersebut merupakan kepentingan nasional China yang telah mendorong terbentuknya kebijakan luar negeri China saat ini (baik tujuan maupun strategi), termasuk di dalamnya kebijakan energi China yang menjadi bagian penting dalam pencapaian *national interest* China yaitu revitalisasi nasional.<sup>61</sup> Revitalisasi nasional ini bagi China berarti pemulihan dan perlindungan China sebagai bangsa yang kuat dan merdeka yang tidak dapat dikalahkan oleh penaklukan dan dominasi asing.<sup>62</sup> Konsep ini pun yang membentuk tujuan politik luar negeri China yang termanifestasi dalam

---

<sup>60</sup> Evan S. Medeiros, “*China’s International Behaviour: Activism, Opportunism and Diversification*”, *RAND Corporation, Op.Cit.*, hlm. xv-xxii, dimana menekankan kebangkitan China menjadi *major power* merupakan sebuah *grand strategy* China dalam upayanya menghadapi tantangan dalam lingkungan domestik dan eksternalnya, yang dapat diakomodir dengan mengambil peluang-peluang dalam keterlibatannya dalam lingkup internasional guna memperbesar pengaruh dan peran globalnya untuk dapat melegitimasi kepentingannya, terlepas dari dampak konfrontasi yang ditimbulkan oleh aktivitas internasionalnya.

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Konsep revitalisasi nasional dalam Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Persepsi Nasional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 177.

diplomasi China dalam mengakses sumber daya sekaligus sebagai upaya mengurangi persepsi China sebagai ancaman oleh negara lain lewat diplomasi energinya (hubungan politik, militer dan ekonomi seperti yang telah dijelaskan di awal).

Oleh karena itu, dalam realisme politik, kepentingan nasional China dapat diterjemahkan sebagai kemampuan strategis atau ekonomi yang sangat melekat dengan konsep revitalisasi nasional China yang mana telah membentuk prioritas, orientasi dan tujuan politik dari kebijakan luar negerinya.<sup>63</sup>

Dengan demikian, kepentingan geopolitik China yang terintegrasi dalam kepentingan geoekonominya menjadi salah satu pemicu terbentuknya paradigma neo-merkantilisme dalam implementasi kebijakan energinya yang pragmatis dan oportunistis, yang disatu sisi akan semakin memperkuat persepsi China sebagai ancaman oleh negara-negara di Asia Pasifik khususnya dalam era *post American World* seperti yang diutarakan oleh Fareed Zakaria. Oleh karena itu, upaya diplomasi baik bilateral maupun multilateral yang dimainkan China dalam regionalisme ekonomi lewat organisasi regional yang strategis akan menentukan tercapainya tujuan serta prioritas dari kebijakan luar negeri China khususnya dalam keamanan energi yang berpengaruh terhadap konstelasi geopolitik minyak Asia Pasifik.

Eksistensi peran NOC China yang memiliki hubungan kuat dengan pemerintah dimana *foreign investment* lebih dimotivasi oleh kepentingan politik ekonomi strategis ketimbang kegiatan bisnis murni dan bagaimana

---

<sup>63</sup> Scott Burchill, Andrew Linklater (terj: M. Sobirin, *Teori-Teori Hubungan Internasional*), (Bandung: Nusamedia, 2009), hlm. 101.

perubahan strategi dan perilaku serta pengaruh aktivitas NOC China akan berdampak pada keamanan energi di Asia Pasifik akan menjadi fokus kajian skripsi ini.

Disamping itu, pengaruh aktivitas dan perilaku NOC China terhadap konstelasi geopolitik minyak di Asia Pasifik dan kecenderungan stabilitas atau instabilitas dengan indikator kerjasama regional atau konflik, yang keduanya mengarah pada pembentukan *building block* sebagai strategi aliansi juga menjadi bagian dari analisa skripsi ini.

Keterlibatan China dan sejumlah negara dalam regionalisme baru berupa *building block* merupakan salah satu strategi diplomasi dalam mengamankan pasokan sumber daya alam dan menanggulangi krisis energi sebagai ancaman kewanitaan nasional, yang disatu sisi menambah daya kompetitif dan *bargaining power* dalam politik global.

Upaya-upaya kerjasama dalam bentuk *block building* tersebut tentu memberikan nilai strategis bagi perusahaan NOC China dalam memperoleh akses yang mudah dalam kegiatan eksplorasi di luar negeri lewat penguatan hubungan diplomatik dan dengan demikian semakin memperkuat daya saing NOC China khususnya CNPC dalam persaingan politik bisnis internasional dimana terdapat IOC-IOC sebagai kompetitor yang tidak dapat dianggap remeh. Karena itu, akan memicu signifikansi politik neo-merkantilisme yang kuat.

Penelitian ini juga ingin melihat sejauh mana motif pencarian minyak dan strategi China untuk mengamankan akses ke sumber minyak lewat NOC-nya yang diterjemahkan dalam diplomasi energi, berkorelasi

dengan ambisi revitalisasi nasional China guna bangkit menjadi sebuah *major power*. Seperti yang dikatakan Joseph Nye bahwa transisi struktur kekuasaan dalam sistem internasional kini telah bergeser ke Timur.<sup>64</sup> Dalam konstelasi geopolitik, kekuatan ekonomi menjadi senjata diplomasi yang kuat dalam menanamkan pengaruh di abad 21.

Dengan demikian berdasarkan pemaparan di atas maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian guna menganalisa lebih dalam tentang bagaimana dan seperti apa *grand strategy* China dalam memenuhi kebutuhan energi khususnya dalam konteks pencapaian revitalisasi nasionalnya lewat peran NOC-nya serta pengaruhnya terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik ke dalam skripsi dengan judul:

**“Strategi *Energy Security* China Serta Pengaruhnya Terhadap Geopolitik Minyak Di Asia Pasifik: Analisis Ekonomi Politik Internasional Tentang Peran *National Oil Company* (NOC) China Dalam Geopolitik Minyak.”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Oleh karena itu, berdasarkan uraian dalam latarbelakang, maka penulis mengajukan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Seperti apa *energy security* China dalam upaya mengatasi ketergantungannya terhadap energi?
2. Bagaimana hubungan pemerintah China dengan NOC-nya dalam mewujudkan *energy security*?

---

<sup>64</sup> Reuters edisi 12 Mei 2011, *Feature- As China Rises, “Grand Strategy” Talk Back in Style*, <http://www.reuters.com/article/2011/05/12/world-strategy-idUSLDE74B1MG20110512>. Diakses pada 21 Mei 2011.

3. Sejauh mana peran dan tantangan NOC China dalam merepresentasikan kepentingan nasional China?
4. Bagaimana konstelasi geopolitik minyak di Asia Pasifik terkait dengan strategi *energy security* China?
5. Sejauh mana signifikansi NOC China dan pengaruhnya terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik?

### **1. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi masalah ini dengan menitikberatkan pada strategi *energy security* China melalui analisis ekonomi politik internasional tentang peran *national oil company* (NOC) China yaitu CNPC (*China National Petroleum Corporation*) dan pengaruhnya terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik. Negara-negara Asia Pasifik yang dibahas dalam skripsi ini yaitu Jepang, India, Indonesia dan Korea Selatan sebagai *major player* dalam geopolitik minyak Asia Pasifik, dilihat dari signifikansi konsumsi, produksi minyak dan kegiatan perusahaan minyaknya di Asia Pasifik. Periode yang dipakai dalam analisa yaitu 2001-2009.

### **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka perumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu:

**“Bagaimana strategi *energy security* China melalui peran *national oil company* China berpengaruh terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik?”**

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodologis. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *energy security* China dalam upaya mengatasi ketergantungannya terhadap energi.
2. Untuk mengetahui hubungan pemerintah China dengan NOC-nya dalam mencapai *energy security*.
3. Untuk mengetahui peran dan tantangan NOC China dalam merepresentasikan kepentingan nasional China.
4. Untuk mengetahui konstelasi geopolitik minyak di Asia Pasifik terkait dengan strategi *energy security* China.
5. Untuk mengetahui signifikansi NOC China dan pengaruhnya terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain adalah untuk memberikan manfaat kepada para pembaca, mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Khususnya peminat

masalah-masalah HI dalam bidang Ekonomi Politik Internasional khususnya soal dinamika politik minyak.

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan, dan teori yang diperoleh selama belajar di Perguruan Tinggi.
3. Sebagai masukan dan bahan komparatif bagi penelitian sejenis serta menjadi sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
4. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian kesarjanaan Strata Satu (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

Untuk memperoleh pijakan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teori yang digunakan dan konsep yang berkaitan dengan objek penelitian, yang akan berguna dalam menganalisa masalah. Tujuannya yaitu agar jalannya penelitian konsisten dari awal hingga akhir dan dapat mencapai tujuan penelitian.

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kecenderungan dinamika perkembangan hubungan internasional di abad 21 adalah kompleks dan interdependen. Dimensi perubahannya semakin luas baik dari segi aktor maupun isu. Pasca Perang Dingin merupakan momentum penting dimana terjadi perubahan dari *state centric* menuju *multi centric* dan *non-state actor* memiliki peran yang semakin signifikan dalam

sistem internasional. Selain itu *low politic*<sup>65</sup> pun muncul sebagai isu sentral di dalam sistem yang semakin multipolar<sup>66</sup> ini bersamaan dengan mengemukanya isu-isu keamanan global kontemporer.

Salah satu wujud interaksi dalam hubungan internasional yaitu politik internasional yang di dalamnya terkandung elemen-elemen kerjasama dan konflik. Politik internasional bisa didefinisikan sebagai *struggle for power* seperti yang dinyatakan Hans Morgenthau.<sup>67</sup>

Politik internasional Morgenthau adalah perjuangan dan penggunaan kekuasaan (*power*) bangsa demi mencapai *national interest*. Menurut Coulombis dan Wolfe unsur *power* terdiri dari daya paksa (*force* atau *hard power*) yaitu ancaman atau penggunaan kekuatan militer, ekonomi, atau sarana pemaksa lainnya oleh negara untuk tujuan politiknya. Unsur berikutnya yaitu pengaruh (*influence* atau *soft power*) yaitu penggunaan alat-alat persuasi tanpa kekerasan oleh negara dan unsur wewenang (*authority*) yaitu sikap tunduk sukarela pada arahan yang diberikan karena penghormatan, kasih sayang, kedekatan, mutu kepemimpinan, pengetahuan dan keahlian.<sup>68</sup>

Beberapa pemikiran baru terus berkembang dalam politik internasional saat ini. Robert Purnel (1973) menjelaskan bahwa politik internasional merupakan suatu aspek politik tentang ketidaksetujuan, persaingan, dan bermacam-macam hal yang muncul dari keinginan untuk mengubah sesuatu dalam hubungannya dengan negara. Menurut Strauzs-Hupe

---

<sup>65</sup> *Low politic* merupakan isu-isu non-militer yaitu menyangkut kerjasama di bidang ekonomi, sosial dan budaya yang lebih menekankan pada penggunaan *soft power* dalam interaksi internasional.

<sup>66</sup> Multipolaritas adalah distribusi kekuasaan di mana lebih dari dua negara-bangsa memiliki jumlah kekuatan militer, budaya, dan pengaruh ekonomi yang hampir sama.

<sup>67</sup> Martin Griffiths, *Op.Cit.*, hlm. 36-40.

<sup>68</sup> Moechtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3S, 1994), hlm. 118-119.

dan Possany (1956) politik internasional mempelajari sikap dari suatu komunitas dalam usahanya untuk melawan secara langsung pada satu atau lebih komunitas asing.

Dengan demikian pemahaman politik internasional merupakan suatu proses interaksi yang berlangsung dalam suatu wadah atau lingkungan, atau suatu proses interaksi, inter-relasi dan *interplay* antar aktor dalam lingkungannya.

Faktor utama dalam lingkungan internasional dapat diklasifikasikan dalam tiga hal, yaitu: (1) lingkungan fisik, seperti lokasi geografis, sumber daya alam, teknologi suatu bangsa; (2) penyebaran sosial dan perilaku, yang di dalamnya mengandung pengertian sebagai hasil pemikiran manusia sehingga menghasilkan budaya politik serta munculnya kelompok-kelompok elit tertentu; (3) lembaga-lembaga politik dan ekonomi serta organisasi-organisasi internasional dan perantara-perantara ekonomi serta politik lainnya.<sup>69</sup>

Interaksi antara politik luar negeri masing-masing negara baik sebagai aksi maupun reaksi merupakan wujud dari politik internasional. Politik internasional konsern pada tujuan-tujuan resmi pemerintah, cara-cara dan hal-hal yang dipakai pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Tujuan-tujuan dan tindakan-tindakan tersebut diuraikan dalam kebijakan luar negeri yang berisi norma-norma, nilai-nilai yang ingin dikejar

---

<sup>69</sup> Howard Letner.1974. "*Foreign Policy Analysis: A Comparative and conceptual Approach.*" Dalam *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Bandung, PT. Remaja Risdakarya, 2005), hlm. 44.

dalam interaksi dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dibentuk dari pertimbangan kondisi internal dan eksternal suatu negara, yang ditujukan untuk mencapai dan memelihara identitas sosial, hukum, dan geografi suatu negara sebagai negara-bangsa<sup>70</sup>. Menurut Rosenau, pengertian kebijakan luar negeri yaitu:

“Upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya”.<sup>71</sup>

Kebijakan luar negeri menurutnya ditujukan untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidup suatu negara.

Sementara menurut Holsti, lingkup kebijakan luar negeri meliputi semua tindakan serta aktivitas negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut, serta hirau akan berbagai kondisi internal yang menopang formulasi tindakan tersebut<sup>72</sup>.

Salah satu teori pengambilan keputusan dan kebijakan politik luar negeri dikemukakan oleh William D. Coplin.<sup>73</sup> Tindakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh empat determinan. Pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua, situasi ekonomi dan militer tersebut termasuk faktor geografis yang selalu menjadi pertimbangan utama dalam pertahanan/keamanan. Ketiga, konteks internasional dan keempat, konteks pengambil keputusan.

Dalam mencapai tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan luar negeri, maka diperlukan politik luar negeri. Politik luar negeri

---

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 15.

<sup>71</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, hal. 27.

<sup>72</sup> K.J. Holsti, *Op.Cit.*, hlm. 21.

<sup>73</sup> William D Coplin. *Pengantar Politik Internasional*. Sinar Baru Algensindo, Bandung 2003

merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara<sup>74</sup>. Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>75</sup>

Dalam pelaksanaan politik luar negeri setidaknya ada terdapat tiga determinan yang harus diperhatikan. Pertama, adalah kepentingan nasional, dimana politik luar negeri adalah cermin dari kepentingan nasional suatu negara terhadap lingkungan luarnya. Pendapat ini dikemukakan oleh J. Frankel :

“Politik luar negeri merupakan pencerminan dari kepentingan nasional yang ditujukan ke luar negeri, yang tidak terpisah dari keseluruhan tujuan nasional, dan tetap merupakan komponen atau unsur dari kondisi dalam negeri”.<sup>76</sup>

---

<sup>74</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, (New York: The Free Press, 1976) hlm. 15.

<sup>75</sup> James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*. (New York: The Free Press, 1980), hlm. 171, 173.

<sup>76</sup> J. Frankel, *Hubungan Internasional* (terjemahan: Sungguh Barsaudara) (Jakarta: ANS, 1990) hlm. 55.

Dalam keterkaitan kepentingan nasional dan politik luar negeri adalah bahwa pelaksanaan politik luar negeri tersebut semaksimal mungkin dapat menguntungkan bagi kepentingan nasional, baik diukur dari kepentingan keselamatan dan keamanan nasional, maupun diukur dari peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan nasional. Hal ini dipertegas oleh pendapat Saputra, tentang kepentingan nasional:

“Kepentingan nasional (*national interest*) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun bisa juga terjadi *interplay* antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjalin hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru”.<sup>77</sup>

Determinan kedua adalah kemampuan nasional. Kemampuan nasional adalah kemampuan yang dimiliki suatu bangsa, baik secara aktual maupun bersifat potensial. Dengan kemampuannya, segenap daya bangsa baik yang manifest maupun laten yang meliputi segala sumber daya yang melekat pada bangsa yang bersangkutan.

“Strategi politik luar negeri adalah output. Sedangkan input berasal dari kondisi-kondisi lingkungan ekstern dan intern yang dikonversi menjadi input, melalui proses pemahaman situasi yang dikaitkan dengan penentuan tujuan yang akan dicapai, mobilisasi untuk mencapai tujuan tersebut dan upaya-upaya nyata dalam merealisasikan tujuan yang sudah ditetapkan”.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Sumpena Prawira Saputra, *Politik Luar Negeri Indonesia*, (Jakarta: Remaja Karya Offset, 1985), hlm. 24.

<sup>78</sup> K.J. Holsti, *Op. Cit*, Hlm. 88

Politik luar negeri sebagai serangkaian atau sekumpulan komitmen, mengacu kepada strategi, kepentingan dan tujuan-tujuan khusus (*specific goals*) serta sarana-sarana (*means*) untuk pencapaiannya. Komitmen dan rencana tindakan ini dapat ditelaah dari kondisi riil dan situasi nyata yang sedang berlangsung, sehingga dapat lebih mudah diamati dan dianalisa. Sebagaimana pandangan Jack C. Plano dan Roy Olton, bahwa:

“Politik luar negeri merupakan strategi atau rencana yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.”<sup>79</sup>

Pendapat tersebut diperkuat oleh Moechtar Mas'oe'd yang memberikan dasar bagi analisis strategi politik luar negeri pada asumsi sebagai berikut:

1. Perilaku politik luar negeri suatu negara pasti diarahkan untuk mencapai satu atau beberapa tujuan pada ruang lingkup internasional.
2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negaranya.
3. Para pembuat keputusan harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara lain.<sup>80</sup>

Determinan ketiga adalah kondisi internasional dengan sifatnya yang dinamis. Setiap negara merumuskan kebijaksanaan politik luar negeri, tetapi tidak akan mungkin mengatur dan menetapkan proses

---

<sup>79</sup> Roy Olton dan Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional*, Terjemahan, Wawan, CV. Aardin, Bandung, 1990, Hal. 5

<sup>80</sup> Moechtar Mas'oe'd, *IOp.Cit.*, hlm. 90.

dinamika internasional sebagai akibat dari interaksi yang terus menerus antara bangsa-bangsa di dunia.

“Politik luar negeri berhubungan dengan semua usaha dari sistem politik nasional untuk beradaptasi dengan lingkungan geopolitiknya dan untuk menetapkan tindakan pengendalian terhadap lingkungannya agar dapat memenuhi nilai-nilai (*goal values*) yang terdapat dalam sistemnya”.<sup>81</sup>

Salah satu aspek politik internasional yang menjadi ciri hubungan internasional pasca Perang Dingin adalah kerjasama yaitu perilaku aktor *state* maupun *non-state* dalam transaksi internasional. Menurut Teuku May Rudy:

“Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*cooperation*), persaingan (*competition*) dan pertentangan (*conflict*). Jadi masalahnya adalah bagaimana memelihara, mempertahankan dan meningkatkan kerjasama yang berlangsung secara adil dan menguntungkan; bagaimana mencegah dan menghindari konflik, serta bagaimana mengubah kondisi-kondisi persaingan dan pertentangan menjadi kerjasama”.<sup>82</sup>

Dalam suatu kerja sama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerja sama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerja sama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerja sama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. (Doughterty & Pfaltzegraff, 1997: 419).

Dengan kata lain, kerja sama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan.

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 133

<sup>82</sup> Teuku May Rudy, *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global: Isu, Konsep, teori dan Paradigma*, (Bandung: Refika Aditama, 1993), hlm. 2.

Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerja sama internasional. (Holsti, 1992: 650).

Pasca Perang Dingin, ekonomi politik internasional menjadi isu yang penting dalam agenda politik global sebagai dampak dari globalisasi ekonomi yang makin mengarah pada pembebasan pasar dan integrasi ekonomi di berbagai belahan dunia dengan karakteristik yang interdependen dan kompleks. Ekonomi politik internasional menurut Mohtar Mas'oeed adalah sebagai berikut:

“Ekonomi Politik Internasional sebagai studi tentang saling-kaitan dan interaksi antara fenomena politik dengan ekonomi, antara “negara” dengan “pasar”, antara lingkungan domestik dengan yang internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat.”<sup>83</sup>

Dan Robert Gilpin mengartikan ekonomi politik internasional sebagai:

“Pada satu pihak politik begitu menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan; penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuknya sangat menentukan hakikat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan; ekonomi merombak kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya hal itu merombak sistem politik, sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi dinamika hubungan internasional di zaman modern pada pokoknya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik”<sup>84</sup>

Perdagangan bebas dan integrasi ekonomi yang berlangsung saat ini merupakan konsekuensi dari kemenangan liberalisme pasca Perang

---

<sup>83</sup> Mohtar Mas'oeed, *Op.Cit.*, hlm. 4.

<sup>84</sup> Robert Gilpin, *US Power and The Multinational Corporation* (New York: Basic Books, 1975), hlm. 21-22 dalam Walter S. Jones, *Logika Hubungan Internasional: Kekuasaan, Ekonomi-Politik Internasional, dan Tatanan Dunia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 223-224.

Dingin. Seperti yang dinyatakan Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man* bahwa tatanan ekonomi politik yaitu kapitalisme liberal merupakan tatanan akhir dari tata ekonomi dunia.<sup>85</sup>

Kapitalisme yang dibawa oleh paham liberal ini mengalami pergeseran pemikiran guna mempertahankan dominasinya yang ditandai dengan tiga periode perkembangan. Periode pertama yaitu kapitalisme klasik atau kapitalisme Adam Smith yang berlangsung selama abad 19 dimana menerapkan prinsip *laissez-faire* yang memisahkan antara urusan negara dengan ekonomi. Kapitalisme liberal ini ternyata menghasilkan ketidakadilan yang tidak mampu diatasi oleh pasar. Oleh karena itu, di periode kedua, muncul neo-kapitalisme atau yang dikenal dengan neo-liberalisme dimana negara melakukan intervensi guna mengatasi dampak perubahan sosial dan ekonomi akibat sistem kapitalisme klasik. Paham Keynesian<sup>86</sup> merupakan landasan bagi lahirnya gagasan neo-liberalisme yang menekankan peran pemerintah yang kuat dalam pasar bebas. Paradigma ini kemudian dilembagakan dalam rezim ekonomi internasional yaitu World Bank, IMF dan GATT. Dan di periode ketiga, kapitalisme mempertahankan dominasinya lewat kerangka perdagangan multilateral WTO. Periode ini ditandai dengan aktivitas perusahaan multinasional yang mempromosikan prinsip kapitalisme baru serta diterapkannya kebijakan deregulasi dan ekonomi terbuka khususnya di negara berkembang.<sup>87</sup>

---

<sup>85</sup> Scott Burchill & Andrew Linklater, *Op.Cit.*, hlm. 37.

<sup>86</sup> Sebuah filosofi dan penerapan pemakaian mesin pemerintah (melalui kebijakan fiskal dan keuangan ) untuk mengendalikan serta mengarahkan ekonomi bebas. Keynesian adalah paradigma ekonomi yang muncul sebagai kritik terhadap kapitalisme yang mengabaikan peran pemerintah.

<sup>87</sup> Adji Samekto, *Op.Cit.*, hlm. 24-39.

Pandangan liberalisme percaya bahwa dalam sistem ekonomi dunia yang interdependen, mekanisme pasar adalah cara yang efektif dan efisien dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan.

Aliran ekonomi politik internasional yang saat ini sedang muncul di negara-negara berkembang adalah gagasan merkantilisme dalam perdagangan internasional. Latarbelakang munculnya gagasan tersebut di abad ini yaitu: (1) kepentingan mempertahankan kekuasaan politis oleh negara dan (2) instrumen dalam mensejahterakan rakyat lewat monopoli negara dalam menguasai kekayaan alam.<sup>88</sup>

Gagasan utama dari pemikiran ini yaitu kemakmuran negara merupakan hal yang paling vital yang dicapai lewat pengaturan dan perencanaan ekonomi secara sentral karena dianggap paling efisien untuk mencapai cita-cita suatu bangsa (Stephen Enke. 1963: 66-68).<sup>89</sup>

Aliansi antara kelompok saudagar dan birokrat telah mewujudkan ekspansi komersial dan teritorial atas dasar kepentingan bersama. Para saudagar memerlukan perlindungan negara/pemerintah dalam usaha-usaha mereka, dan sebaliknya pemerintah memerlukan orang-orang kaya untuk dukungan kekuasaan mereka atas negara.<sup>90</sup>

Paham merkantilisme kini berkembang menjadi neo-merkantilisme yang muncul setelah PD II. Dalam buku *Global Political Economy: Understanding the International Economic Order* (2001), Robert Gilpin menjelaskan bahwa perspektif neo-merkantilisme mencakup bantuan dari negara, regulasi dan proteksi sektor industri spesifik untuk

---

<sup>88</sup> Ian Bremmer, *Op.Cit.*, hlm. xi.

<sup>89</sup> Yanuar Ikbar, *Op.Cit.*, hlm. 38-39.

<sup>90</sup> *Ibid.*

meningkatkan rasa kompetitif internasional mereka dan meraih *commanding heights* dari ekonomi global.<sup>91</sup>

Salah satu kecenderungan yang dihasilkan oleh globalisasi ekonomi ini yaitu interdependensi yang menjadi ciri dari tatanan ekonomi dunia modern. Interdependensi merupakan konsekuensi dari semakin terintegrasinya ekonomi negara-negara di dunia. Robert Keohane dan Joseph Nye mengartikan interdependensi sebagai kondisi saling ketergantungan antar negara dalam sumber daya dan hasil produksi, sehingga kebijakan yang dibuat suatu negara akan berpengaruh secara signifikan pada negara lain.<sup>92</sup>

Menurut Anak Agung Banyu Perwita fenomena interdependensi memiliki beberapa sektor penting yang perlu diamati dalam hubungan antar negara. Pertama, sektor perdagangan melihat bahwa hubungan ekonomi melalui perdagangan dapat berubah dan perubahan tersebut dapat mempengaruhi interdependensi dan menciptakan *mutual dependent*. Kedua, sektor investasi; konsekuensi dari perubahan pola investasi berupa investasi langsung dalam bentuk kepemilikan saham yaitu peningkatan kendali dan keterlibatan investor secara langsung dalam pengelolaan investasinya. Ketiga, sektor finansial; melihat peran vital dari nilai tukar uang dalam transaksi perdagangan. Perubahan-perubahan dalam operasi keuangan telah meningkatkan hubungan interdependensi. Keempat, sektor politik; terdapat suatu kesadaran bahwa negara tidak dapat menjamin kelangsungan hidupnya secara mandiri tanpa kerjasama dengan negara lain.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Op.Cit.*, hlm. 80.

<sup>92</sup> Robert. O. Keohane & Joseph S. Nye, *Power and Interdependence: World Politics in Transition* (Boston: Little Brown Company, 1977), hlm. 24-25.

<sup>93</sup> Anak Agung Banyu Perwita, *Op.Cit.*, hlm. 78-79.

Keberhasilan suatu negara dalam kerjasama internasional sangat ditentukan oleh *power*, kemampuan tawar menawar dan rezim internasional. *Power* dan kemampuan tawar menawar terutama berkaitan dengan kondisi interdependensi yang asimetris. Kemudian rezim internasional akan bertumpu pada saling ketergantungan asimetris yang menyediakan setiap pihak untuk saling mempengaruhi melalui kebijakan ekonomi-politiknya dalam mencapai kesepakatan.<sup>94</sup>

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa di abad 21 ini, kepentingan ekonomi dan politik telah terintegrasi dalam hubungan yang kompleks yang mampu meredistribusi dan bahkan merekonstruksi struktur kekuasaan yang sudah ada baik ekonomi maupun politik.

Perubahan yang dibawa oleh globalisasi menjadikan isu-isu global kontemporer sebagai agenda global baru (*new global agenda*) dalam politik dan kebijakan luar negeri negara-negara modern yang dihadapkan dengan tuntutan tata dunia baru (*new world order*). Isu global kontemporer merupakan isu non-konvensional yang dimensi isu, ancaman dan aktornya lebih luas dan kompleks karena menyentuh aspek-aspek *human security* dan mengancam keamanan nasional dan global.

Keamanan dalam pengertian objektif merupakan ukuran-ukuran tidak adanya ancaman terhadap nilai-nilai yang dikejar dalam politik dan kebijakan luar negeri dan secara subjektif tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Arnold Wolfers).<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid*, hlm. 79.

<sup>95</sup> Arnold Wolfers dalam Baylis & Steve Smith, 1999, “*The Globalization of World Politics*”, Oxford University Press. Hlm 195

Konsep keamanan tradisional yang melihat asal ancaman hanya dari aspek militer menjadi kurang relevan akibat perkembangan nasional dan internasional yang telah mengubah sifat dan dimensi ancaman dan bergeser ke konsep yang lebih luas seperti yang dikemukakan oleh Brown, Ullman, Nye dan Lyn-Jones yang mengatakan bahwa *international security studies* membutuhkan sebuah agenda yang secara substansial lebih luas dibandingkan dengan keamanan militer.<sup>96</sup>

Dalam konteks keamanan non-tradisional, ancaman terhadap keamanan nasional berasal dari domestik dan global, dimana perubahan di suatu negara dapat mempengaruhi keamanan nasional di negara lain. Selain itu, sifat ancaman pun semakin meluas (multidimensional) dan makin komprehensif, sehingga isu-isu global kontemporer (isu ekonomi, lingkungan, sosial-budaya dan demokrasi serta HAM) menjadi ancaman signifikan bagi keamanan nasional negara modern.<sup>97</sup>

Keamanan energi kini telah menjadi bagian penting dalam isu keamanan kontemporer baik nasional maupun global. Sejarah telah membuktikan signifikansi krisis energi yang mengancam stabilitas keamanan nasional dan global seperti yang dinyatakan oleh Imada Sagita bahwa:

“Identifikasi permasalahan energi sebagai sebuah problema keamanan global berangkat dari suatu perhatian strategik pada tahun 1970-an, dengan diberlakukannya embargo minyak oleh OPEC tahun 1973 dan terjadinya Perang Irak-Iran. Pada awalnya, isu keamanan energi (*energy security*) terkait dengan instabilitas region Timur Tengah dan kemudian diangkat sebagai sebuah isu yang signifikan di region tersebut. Sebesar 63% cadangan minyak dunia dan 41% cadangan gas alam dunia terkonsentrasi di wilayah Timur Tengah. Di kemudian hari, evolusi dari percampuran geopolitik antara Timur Tengah terhadap para konsumen energi dari Barat mengakibatkan akumulasi persoalan keamanan seperti terorisme.”<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Barry Buzan, “*People, State and Fear*”, (Colorado: Lynne Rienner Publisher, 1991), hlm. 23.

<sup>97</sup> Baca selengkapnya tentang lima dimensi keamanan kontemporer dari perspektif realisme menuju neo-realisme dalam Yulius P. Hermawan, *Op.Cit.*, hlm. 40-47.

<sup>98</sup> Global Jurnal Politik Internasional, *Op.Cit.*, hlm. iv.

Qystein Noreng juga menyatakan bahwa:

“Keretakan persekutuan Atlantik gara-gara embargo minyak Arab yang dipimpin oleh Saudi Arabia tersebut membuat Amerika terperanjat bahwa ternyata minyak merupakan suatu senjata yang sangat efektif dan dapat menggoyahkan sendi-sendi perekonomian Barat.”

Di abad 21 energi menjadi faktor kunci bagi berjalannya industrialisasi dan urbanisasi dalam konsep negara modern. Dapat dikatakan bahwa energi merupakan faktor penentu yang menggerakkan ekonomi global saat ini<sup>99</sup> dimana hal tersebut merupakan konsekuensi kegiatan ekonomi modern yang semakin meningkatkan penggunaan energi dalam jumlah besar.

Minyak merupakan salah satu sumber energi yang potensial dan strategis. Menurut Qystein Noreng minyak adalah satu-satunya sumber energi primer paling ideal karena faktor-faktor fleksibilitasnya yang mudah dipindahkan<sup>100</sup>, yang menjadikan minyak vital bagi pertumbuhan ekonomi negara-modern berbasis industri. Peranan minyak dalam perekonomian global seperti yang diutarakan Bachrawi Sanusi yaitu:

“Lebih dari 100 tahun peranan minyak dan gas bumi telah mengubah ekonomi dunia. Banyak negara maju atau industri telah memanfaatkannya. Apalagi sebelum OPEC terbentuk pada bulan September 1960, banyak negara maju lewat berbagai perusahaan minyak raksasanya telah memperoleh untung yang sangat besar. Keuntungan mereka terutama dalam usaha memompa atau memproduksi minyak yang membanjiri pasaran di dunia, akibatnya harga minyak dunia merosot terus.”<sup>101</sup>

Oleh karena itu, minyak dapat menjadi faktor potensial bagi terjadinya kerjasama atau sebaliknya konflik baik global maupun regional.

<sup>99</sup> Philip Connelly dan Robert Perlman, *The Politics of Scarcity: Resources Conflicts in International Relation* (Oxford: Oxford University Pers, 1975), hal. 26ff, dalam M Kholid Syeirazi, *Op.Cit.*, hlm 29.

<sup>100</sup> Qystein Noreng, *Minyak dalam Politik: Upaya Mencapai Konsensus Internasional* (Jakarta: Rajawali, 1983) (terjemahan: Drs. Sahat Simamora), hlm. 28-29.

<sup>101</sup> Bachrawi Sanusi, *Minyak Bumi Mengubah Ekonomi Dunia* (Ind-Hill Co, 1985), hlm. v.

Menurut Michael Klare, sumber konflik pasca Perang Dingin bukanlah faktor kulutral budaya seperti yang dikemukakan Samuel P. Huntington, melainkan perebutan akses terhadap sumber daya alam khususnya minyak bumi. Di abad ke-20 minyak dan sumber mineral adalah salah satu sumber konflik akan tetapi di abad ke-21 minyak bumi menjadi sumber konflik paling penting di banding sumber-sumber lainnya.<sup>102</sup>

Ketergantungan negara modern akan minyak akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduknya meskipun dikembangkan energi alternatif namun pengembangan ini membutuhkan biaya tinggi dan waktu lama untuk penyesuaian. Selain itu, minyak merupakan energi primer paling ideal dan bersifat fleksibel.

Apabila ketergantungan ini terus berlanjut maka akan menyebabkan terjadinya kelangkaan minyak karena sifat minyak yang terbatas dan *non-renewable*. Hipotesa diatas didukung oleh teori Neo-Malthus oleh Thomas Robert Malthus yang meramalkan tentang kelangkaan sumber daya alam yang akan terjadi apabila negara-negara di dunia tidak mengendalikan pertumbuhan penduduknya. Kapasitas produksi bumi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk. Menurut pandangan ini dunia sudah tidak mampu lagi menampung penduduk yang ada.<sup>103</sup>

Paul Ehrlich dalam bukunya *The Population Bomb* yang direvisi menjadi *The Population Explotion* melihat penurunan fungsi alam dan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan berkorelasi dengan penambahan penduduk dunia. Meadow dalam bukunya *The Limit to Growth*

---

<sup>102</sup> Michael T Klare, *The Resource Wars: The New Landscape of Global Conflict* (New York: Owl Books, 2002), dalam M Kholid Syeirazi, *Op.Cit.*, hlm. 36.

<sup>103</sup> Ida Bagoes Mantra, *Demografi Umum* (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2006), hlm. 50-53.

juga menuliskan tentang bagaimana pertumbuhan industri dan penduduk dibatasi oleh terbatasnya sumber daya alam yang ada.<sup>104</sup>

Oleh karena itu, antisipasi terhadap krisis dan kelangkaan minyak yaitu dengan mengurangi dependensi terhadap minyak dengan cara diversifikasi energi lewat pengembangan energi alternatif seperti batu bara, biomassa, nuklir, dan lain-lain serta pengamanan pasokan minyak dan menjaga kestabilan harga minyak di pasar internasional. Akan tetapi disatu sisi, pengembangan energi alternatif ini justru menjadi sebuah *security dilemma* karena memicu terjadinya penyebaran nuklir dan menyebabkan pencemaran lingkungan dan *global warming*.

Oleh karena itu, isu keamanan energi menjadi semakin penting dalam konteks ekonomi politik internasional dan keamanan global kontemporer abad 21. Keamanan energi menurut Mason Willrich diartikan sebagai:

“...the assurance of sufficient energy supplies to permit the national economy to function in a politically acceptable manner.”<sup>105</sup>

Dalam konteks ekonomi, keamanan energi menurut Imada Sagita yaitu:

“...mengacu pada kondisi dari ketersediaan dan ketercukupan suplai energi pada tingkat harga yang rasional dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi.”<sup>106</sup>

Sedangkan menurut Morse:

“...the reliability of supplay and a strategy to prevent the interruption of oil supplies, reduce vulnerability and alleviate economic damage.”<sup>107</sup>

---

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 54-55.

<sup>105</sup> Mason Willrich, *Energy and World Politics*, (New York: The Free Press, 1978), pp.70-79, dalam *Global Jurnal Politik Internasional, Op.Cit.*, hlm. 9.

<sup>106</sup> *Ibid.*, hlm. iv.

<sup>107</sup> *Global Jurnal Politik Internasional, Op.Cit.*, hlm. 58.

Sehingga menurut Nurul Isnaeni dalam tulisannya Jepang dan Isu Keamanan Energi: dari Krisis Minyak Dunia hingga Politik Perubahan Iklim, keamanan energi dapat diperoleh ketika:

“suatu negara mampu memenuhi kebutuhannya terhadap ketersediaan sumber daya energi secara berkesinambungan, memiliki kemudahan dalam akses maupun kontrol terhadap perolehan energi, termasuk mendorong stabilitas harga yang terjangkau di pasar energi serta mengurangi segala bentuk kerentanan terhadap kebutuhan energi baik karena faktor-faktor eksternal maupun internal.”<sup>108</sup>

Komponen keamanan energi menurut Makmur Keliat<sup>109</sup> diantaranya pasokan yang cukup, harga yang terjangkau, ramah terhadap lingkungan, aman dari serangan militer bersenjata (lihat tabel 1.3 Komponen-Komponen Keamanan Energi).

Berdasarkan tabel di atas, apabila terjadi ketidakseimbangan dalam komponen-komponen tersebut maka dapat menyebabkan ketidakamanan energi (*energy insecurity*) atau krisis energi yang menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional serta eksistensi negara modern. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa krisis energi merupakan kondisi ketidakseimbangan yang terjadi dalam komponen-komponen keamanan energi tersebut.

Oleh karena itu guna mengantisipasi dan mengatasi krisis energi tersebut, maka diperlukan sebuah kebijakan keamanan energi. Definisi kebijakan keamanan energi yang dikemukakan oleh Makmur Keliat yaitu:

“...kebijakan yang dibuat untuk memberikan solusi terhadap seluruh akar persoalan dari lahirnya empat komponen keamanan energi itu.”<sup>110</sup>

Reformasi ekonomi China yang telah berlangsung selama 20 tahun terakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi China semakin tinggi dan telah

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, hlm. 58-59.

<sup>109</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

<sup>110</sup> *Ibid.*

memicu lonjakan permintaan untuk energi dalam menjalankan kegiatan industri yang semakin luas serta untuk memenuhi kebutuhan struktur komersial serta rumah tangga dengan standar hidup yang makin meningkat. Permintaan energi yang besar ternyata tidak diimbangi dengan pasokan energi domestik China. Ketidakseimbangan antara permintaan energi khususnya minyak yang tinggi dengan hasil produksi domestik membuat China harus mengimpor minyak dari luar negeri, hal ini seperti analisis yang dikeluarkan oleh EIA sebagai berikut:

*“China consumed an estimated 8.3 million barrels per day (bbl/d) of oil in 2009, up nearly 500 million bbl/d from year earlier levels. During that same year, China produced an estimated 4.0 million bbl/d of total oil liquids, of which 96 percent was crude oil. China’s net oil imports reached about 4.3 million bbl/d in 2009, making it the second-largest net oil importer in the world behind the United States and for the first time surpassing Japan’s imports. EIA forecasts that China’s oil consumption will continue to grow during 2010 and 2011, with oil demand reaching almost 9.6 million bbl/d in 2011...China’s total oil production reached 4.0 million bbl/d in 2009, similar to production in 2008, but the first half of 2010 saw an increase of over 0.2 million bbl/d from the same period the year prior... However, Daqing, Shengli, and other ageing fields have been heavily tapped since the 1960s, and output is expected to decline significantly in output in the coming years.”<sup>111</sup>*

Oleh karena itu berdasarkan kondisi energi China di atas, maka kebijakan yang dikeluarkan China cenderung akan berupaya untuk mengamankan pasokan minyak baik di dalam maupun di luar negeri, serta menjamin agar harga minyak di pasar internasional tetap stabil dan terjangkau. Ini sejalan dengan definisi keamanan energi China yang diberikan oleh Evan S. Medeiros:

*“...energy security is defined in terms of two issues: price volatility and security of delivery”<sup>112</sup>*

---

<sup>111</sup> “Country Analysis Briefs”, EIA, Op.Cit., hlm. 3-4.

<sup>112</sup> Evan S. Medeiros, Op.Cit., hlm. 39.

Sependapat dengan hal di atas, dalam buku putih tentang kebijakan energi China yaitu *China's Energy Conditions and Policies* yang dikeluarkan oleh *Information Office of the State Council of the People's Republic of China* tahun 2007, dinyatakan tentang konsep *energy security* China yaitu:

*“China's energy development is based on the principle of relying on domestic resources and the basic state policy of opening to the outside world. The country is striving to ensure a stable supply of energy with a steady increase in domestic energy production and promote the common development of energy around the world. China's energy development will bring more opportunities for other countries and expand the global market, and make positive contributions to the world's energy security and stability”.*<sup>113</sup>

Sehingga, pilihan strategi kebijakan yang diambil China akan cenderung mengarah pada apa yang disebutkan Mason Willrich dalam bukunya *Energy and World Politics* (1978) sebagai komponen utama kebijakan energi dalam menjamin *energy security* yaitu:

*“First, “rationing” which refers to attempts to allocate available supplies and limit consumption. A country adopt this type of policy on the ground that reduction and consumption will diminish the magnitude of many energy supply problems and extend the time for solving them. Second, “stockpiling” which is aimed at reducing an importing country's vulnerability to a supply interruption by providing a cushion against its effect. In this type of policy a country may set the sufficient amount of national energy reserve in order to ensure security and to put a hedge against abnormal price fluctuations. Third, “diversification” which denotes attempts to ensure the continuity of energy supply by diversifying supplies and suppliers. Developing alternative sources (coal, nuclear, solar power, hydropower, and so forth) will reduce a country's dependence on a single energy source. Similarly, with opening contacts with other suppliers a country will reduce its dependence on a single supplier of energy.”*<sup>114</sup>

Signifikansi ancaman krisis energi terhadap keamanan nasional negara membutuhkan peran negara yang kuat dalam menggunakan kekuasaan dan wewenangnya untuk menghasilkan kebijakan energi yang efektif dalam mengatasi persoalan energi. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh

---

<sup>113</sup> “China's Energy Conditions and Policies”, *Information Office of the State Council of the People's Republic of China*, <http://www.china.org.cn/english/whitepaper/energy/237114.htm>. Diakses pada 21 Juni 2011.

<sup>114</sup> Mason Willrich dalam *Global Jurnal Politik Internasional: Krisis Energi*, *Op.Cit.*, hlm. 2.

Bob Sugeng Hadiwinata dalam tulisannya *Bringing the State Back In: Energy and National Security in Contemporary International Relation* :

“...an effective state capable of anticipating, assessing and finding solutions to its energy problem is undoubtedly needed, especially in situation where demand for energy supplants the capacity to supply... The shortfall of oil supply and the steady increase of oil consumption in the past few years - which resulted in sharp increase of oil prices – have rendered the state responsible for formulating and implementing energy policies to ensure national security”.<sup>115</sup>

Dengan melihat peran sektor energi yang strategis dalam keamanan dan kepentingan nasional China maka peran perusahaan minyak nasional (NOC) China sebagai instrumen negara dalam menjamin keamanan energi China khususnya minyak sangat signifikan bagi tercapainya kepentingan nasional China yaitu pembangunan ekonomi demi terwujudnya revitalisasi nasional China. Hal ini didukung oleh pernyataan Ian Bremmer tentang hubungan NOC China dengan pemerintah China yaitu:

“...Negara memaksakan pengaruh yang cukup besar pada kebijakan-kebijakan mereka melalui, misalnya, penetapan harga-harga energi di dalam negeri dan mengendalikan penentuan personil untuk jabatan-jabatan penting...Negara mengutus perusahaan-perusahaan energi milik negara ini ke pasar dunia untuk mengisi cadangan minyak dan gas di dalam negeri yang akan diperlukan oleh China dalam tahun-tahun mendatang...Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menjadi kaki-tangan pemerintah, mereka menjual sebagian produk-produk mereka kepada pembeli-pembeli lain dengan harga pasar. Akan tetapi mereka juga harus memastikan agar pemerintah memiliki akses ke energi yang dibutuhkannya. Mereka dipersenjatai tiga keunggulan kompetitif yang sangat penting. Pertama, mereka memperoleh subsidi yang berlimpah dari pemerintah mereka...Kedua, mereka datang ke Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara, dan bagian-bagian lain dunia dengan dukungan politik penuh dari pemerintah China...Ketiga, badan-badan usaha milik negara ini dapat berbisnis di negara-negara yang tidak dapat dimasuki oleh perusahaan-perusahaan multinasional Barat...”<sup>116</sup>

Ia juga menyatakan:

“...China National Petroleum Company didirikan setidaknya antara lain, untuk membantu Partai Komunis China mempertahankan monopoli atas pengaruh politik di dalam negeri China...”<sup>117</sup>

<sup>115</sup> *Ibid.*, hlm. 2-3.

<sup>116</sup> Ian Bremmer, *Op.Cit.*, hlm.152-153.

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

Peran NOC China yang tidak hanya menjalankan kepentingan bisnis melainkan juga kepentingan politik strategis dinyatakan secara jelas oleh Steven W. Lewis dalam *Chinese NOCs and World Energy Markets: CNPC, SINOPEC and CNOOC*:

“...China’s NOC has largely been successful in going overseas – most importantly in Shouteast Asia, Africa and Central Asia – and in particular where their commercial intersect with the political interests of China’s central government...”<sup>118</sup>

Pernyataan ini kembali didukung oleh analisis *The Baker Institute Energy Forum* dalam sebuah artikel berjudul *The Role of National Oil Companies in International Energy Markets*:

“...Many of these emerging national oil companies are bankrolled or have operations subsidized by their national governments, with geopolitical and strategic aims factored into investments rather than purely commercial considerations. Strategic investment and trade alliances for emerging national oil companies are also being sought on the basis of geopolitics rather than economic considerations. CNPC, for example, is studying forming investment alliances with Petronas and continues to desire a strategic investment in a Russian oil company...”<sup>119</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh Tirta N. Mursitama & Maisa Yudono dalam buku mereka *Strategi Tiga Naga: Ekonomi Politik Industri Minyak China di Indonesia* yaitu:

“...Dalam perspektif kajian ekonomi politik internasional, keberadaan ketiga naga yang mengancam Garuda ini memberikan pesan-pesan penting. Pertama, NOC, sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi suatu negara, ternyata berfungsi juga sebagai *political vehicle* untuk meningkatkan citra negara tersebut ditataran regional maupun internasional. China mulai menikmati

---

<sup>118</sup> Steven W. Lewis, “*Chinese NOCs and World Energy Markets: CNPC, SINOPEC and CNOOC*”, *The Baker Institute Energy Forum*, [http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC\\_CNOOC\\_Lewis.pdf](http://www.rice.edu/energy/publications/docs/NOCs/Papers/NOC_CNOOC_Lewis.pdf), hlm. 55. Diakses pada 29 April 2011.

<sup>119</sup> “*The Role of National Oil Companies in International Energy Markets*”, *The Baker Institute Energy Forum*, <http://www.rice.edu/energy/research/nationaloil/index.html>. Diakses pada 1 April 2011.

buah dari strategi ini. Kedua, dalam krisis ekonomi dunia seperti sekarang, pengembangan NOC disektor strategis ini dapat menjadi pilihan yang menguntungkan walaupun dipastikan akan mendapatkan tentangan yang tidak kecil dari IOC maupun negara-negara asal IOC. Ketiga, bermunculannya begitu banyak NOC di abad ini berdampak kian tajamnya persaingan di antara para NOC...”<sup>120</sup>

NOC didefinisikan sebagai:

“...perusahaan milik negara (*state-owned enterprise*) yang bergerak di sektor minyak dan gas. Negara memiliki kontrol atas NOC tidak hanya dari kepemilikan yang berupa penyertaan saham, tetapi juga dari hak suara yang dapat mengendalikan NOC tersebut. Saham negara dalam NOC paling tidak sebesar 51 persen sehingga dapat menentukan komposisi manajerial, tujuan, strategi, cara-cara perusahaan, hingga kontrol atas kegiatan. Negara juga memiliki kuasa menentukan perlukah kerjasama dilakukan, dengan siapa kerjasama tersebut dilakukan, seperti apa bentuknya, hingga target-target apa yang harus dicapai.”<sup>121</sup>

NOC termasuk dalam kategori perusahaan multinasional (PMN/MNC). Menurut Colman dan Nixson PMN didefinisikan sebagai unit-unit usaha yang memiliki atau mengontrol aset-aset seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, outlet (pusat penjualan), dan perkantoran yang terdapat di dua atau lebih negara<sup>122</sup>.

Karakter utama PMN yaitu lingkup kegiatan *income-generating* (perolehan pendapatan) dilakukan melampaui batas-batas negara, perdagangan PMN kebanyakan terjadi dalam lingkup perusahaan itu sendiri walaupun antarnegara, kontrol terhadap pemakaian modal dan teknologi sangat diutamakan, pengembangan sistem manajemen dan distribusi yang melintasi batas-batas negara, terutama sistem model ventura, lisensi, dan franchise (waralaba).<sup>123</sup>

NOC berperan dalam mengimplementasikan kebijakan energi negara serta tidak jarang dimanfaatkan untuk kepentingan politik strategis. Menurut

<sup>120</sup> Tirta N. Mursitama & Maisa Yudoyono, *Op.Cit.*, hlm. 167-168.

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>122</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, *Politik Bisnis Internasional* (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 117.

<sup>123</sup> *Ibid.*

McPherson fungsi sosial politik NOC diantaranya menyerap tenaga kerja, meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola minyak bumi serta fungsi pembangunan di negaranya.<sup>124</sup>

Dalam konteks politik bisnis minyak internasional, transaksi bisnis yang dilakukan aktor *state* dan *non-state* dipengaruhi oleh faktor-faktor *power* (kekuasaan) dan *structure* (struktur). Faktor kekuasaan menekankan pada negara sebagai aktor utama. Menurut Charles Kindleberger dan Stephen Krasner negara merupakan aktor sentral karena kedudukannya yang otonom sebagai *sovereign entrepreneurs* (investor yang berdaulat).<sup>125</sup>

Dinamika *energy security* di Asia Pasifik cenderung dipengaruhi oleh kondisi ketidakseimbangan antara permintaan akan energi yang tinggi khususnya minyak dengan kemampuan produksi yang rendah serta harga minyak yang tinggi. Hal ini menimbulkan ketidakamanan energi (*energy insecurity*) di kawasan yang dapat mengancam stabilitas pertumbuhan ekonomi dan sosial di negara-negara Asia Pasifik. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis *Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) APEC Energy Demand and Supply Outlook 4<sup>th</sup> Edition* :

*“Since 1990, oil production in the APEC region has remained fairly constant, while oil demand has risen. As a result, oil imports into the APEC region have grown faster than demand...these trends will continue to 2030, with the region becoming more dependent upon oil imported from outside the region.”*<sup>126</sup>

*“Oil demand in the APEC region is expected to increase more quickly than production, leading to increasing levels of oil imports into the region... the growth in oil demand in the APEC region is primarily driven by increasing demand in the transport sector”*<sup>127</sup>

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>126</sup> APERC, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>127</sup> *Ibid.*, hlm. 62.

Dalam *Monthly Oil Market Report* edisi Mei 2011, OPEC menyatakan adanya penurunan dalam pasokan minyak di negara OECD Asia Pasifik:

*“OECD Asia Pacific supply is forecast to decline slightly by 20,000 b/d to average 0.58 mb/d in 2011, flat from the previous month. It is seen to increase in the second quarter, compared with the first quarter, and maintain its level to the end of the year. On a quarterly basis, it is expected to average 0.53 mb/d, 0.60 mb/d, 0.60 mb/d and 0.58 mb/d respectively.”*<sup>128</sup>

Selain itu, kondisi ketidakamanan energi ini diperparah dengan kenaikan harga minyak dunia dipasar internasional yang mengganggu akses pasokan minyak di Asia Pasifik. Dalam *Monthly Oil Market Report* edisi Juli 2011 yang dikeluarkan OPEC dinyatakan:

*“In recent years, oil prices have moved closely with financial factors and speculative activity has continued to push prices beyond levels justified by fundamentals. The market reaction to the recent decision to release of Strategic Petroleum Reserves (SPR) provides a good example. Immediately after the decision, ICE Brent and Nymex WTI crude oil prices fell for three consecutive trading days but then rebounded again within the week.”*<sup>129</sup>

Kenaikan harga minyak dunia berkaitan dengan pemasaran internasional dan dibahas di dalam ekonomi politik internasional. Hal ini diperkuat oleh Mohtar Mas’oed yang menyatakan bahwa “perkembangan empirik ketiga yang mendorong kemunculan kembali ekonomi politik internasional adalah kenaikan harga minyak dan kekhawatiran akan kelangkaan bahan dasar dan energi.”<sup>130</sup> Hal ini menandakan bahwa pengaruh kenaikan harga minyak dunia memiliki peran yang sangat besar bukan hanya pada perkembangan empirik ekonomi politik internasional tetapi juga terhadap

<sup>128</sup> “*Monthly Oil Market Report May 2011*”, OPEC, [http://www.opec.org/opec\\_web/static\\_files\\_project/media/downloads/publications/MOMR\\_May\\_2011.pdf](http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_May_2011.pdf), hlm. 40. Diakses pada 17 Juli 2011.

<sup>129</sup> *Monthly Oil Market Report July 2011*, OPEC, [http://www.opec.org/opec\\_web/static\\_files\\_project/media/downloads/publications/MOMR\\_July\\_2011.pdf](http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/MOMR_July_2011.pdf), hlm. 3. Diakses pada 17 Juli 2011.

<sup>130</sup> Mohtar Mas’oed, *Op.Cit.*, hlm. 16.

negara-negara di dunia. Hal ini kembali diperkuat oleh Mohtar Mas'ood sebagai berikut:

“Misalnya, keputusan OPEC untuk menaikkan harga minyak beberapa kali lipat pada 1973 bukan hanya membuat beberapa negara barat mengubah politik luar negerinya menghadapi Israel, tetapi juga mendorong perubahan dalam tata perdagangan dunia, menimbulkan arus perpindahan dana besar-besaran dari importer ke eksporter minyak, mendorong timbulnya pasar uang baru yang disebut “Petrodollar”, meningkatkan inflasi dunia dan yang kemudian menimbulkan kemerosotan nilai dana yang dikuasai oleh negara-negara OPEC itu sendiri. Kepekaan timbal balik seperti ini mewarnai banyak bidang kegiatan, dengan derajat yang semakin lama semakin meningkat.”<sup>131</sup>

Kenaikan harga minyak tentu akan menghasilkan perubahan sosial yang mengarah pada instabilitas sosial politik dalam negeri dimana ini sesuai dengan definisi ekonomi politik negara yaitu : “sebuah kajian aplikatif-empiris yang mempelajari keterhubungan serta interaksi yang berlangsung atau saling mempengaruhi (dan juga saling mempertimbangkan) antara faktor mekanisme pasar (sebagai komponen ekonomi) dengan faktor kebijakan pemerintah (sebagai komponen politik) serta dengan perubahan sosial (sebagai komponen sosiologi).”<sup>132</sup>

Masih dalam *Energy Demand and Supply Outlook 4<sup>th</sup> Edition* yang dikeluarkan APERC dinyatakan juga tentang harga minyak dunia dan hubungannya dengan keamanan suplai minyak di Asia Pasifik yaitu:

*“This decade so far has seen a dramatic rise in world oil prices...Oil’s price volatility has been damaging to business and consumers throughout the APEC region, and has highlighted the threats to the economy posed by oil supply insecurity. Governments are increasingly seeking policies that will reduce dependence on oil in general and imported oil in particular.”*<sup>133</sup>

Meskipun sejumlah negara-negara di Asia Pasifik melakukan konservasi energi (menurunkan tingkat konsumsi terhadap minyak),

<sup>131</sup> *Ibid.*, hlm. 83.

<sup>132</sup> T. May Rudy, *Op.Cit.*, hlm. 15.

<sup>133</sup> APERC, *Op.Cit.*, hlm. 1.

melakukan diversifikasi energi (pencarian energi alternatif) dan meningkatkan infrastruktur energi serta daya kompetisi di pasar internasional sebagai kebijakan energi jangka panjang,<sup>134</sup> namun tidak dapat dipungkiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, ketergantungan terhadap minyak diluar kawasan sulit untuk dihindari, sebab fokus negara-negara ini adalah bagaimana menghindari risiko ketidakamanan energi yang mengancam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial, seperti yang dinyatakan oleh Mikkal E. Herberg yaitu:

*“Asia’s energy dilemma reflects a set of broad, consistent trends, but conditions and circumstances vary in each of the major countries depending on resources, energy policies, and historical factors. These individual circumstances and policy frameworks largely shape the evolution of the energy security strategies of each of the major countries in the region. The consistent concerns of all the major powers is that energy risks becoming a critical bottleneck to economic growth and social stability.”*<sup>135</sup>

Kondisi ketidakamanan energi ini direspon oleh negara-negara besar importer minyak di Asia Pasifik<sup>136</sup> lewat kebijakan jangka pendek berupa pengamanan pasokan energi ke kawasan yang potensial akan minyak dan mencari sumber energi minyak bumi baru serta kebijakan yang menjamin stabilitas harga minyak, yang merupakan bagian penting dari strategi keamanan energi negara-negara besar Asia Pasifik, khususnya di Asia. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mikkal E. Herberg dalam tulisannya *Asia’s Energy Insecurity: Cooperation or Conflict?* sebagai berikut:

*“Key Asian powers are responding to their growing sense of insecurity with a broad range of strategies to guarantee greater supply and price stability. These*

<sup>134</sup> “A Quest for Energy Security in The 21<sup>st</sup> Century”, APERC, [http://www.ieej.or.jp/aperc/2007pdf/2007\\_Reports/APERC\\_2007\\_A\\_Quest\\_for\\_Energy\\_Security.pdf](http://www.ieej.or.jp/aperc/2007pdf/2007_Reports/APERC_2007_A_Quest_for_Energy_Security.pdf), hlm. 66-68. Diakses pada 24 Juni 2011.

<sup>135</sup> *NBR, Op. Cit.*, hlm. 347.

<sup>136</sup> *Ibid.*, hlm. 348-363, mengenai pembahasan rinci tentang strategi dan kebijakan energi di antara negara-negara besar importer minyak di Asia yang mempengaruhi geopolitik minyak di kawasan Asia Pasifik.

*efforts are growing in scale and scope, and they range from largely cooperative and market-oriented strategies to those that are deeply neo-mercantilist and competitive. These countries are all accelerating their efforts to gain more secure national control of overseas oil and gas supplies by taking equity stakes in overseas oil and gas fields, promoting development of new oil and gas pipelines to Asia, developing broader trade and energy ties, and following up with diplomatic ties to cement relations with the major oil and gas exporting countries.*"<sup>137</sup>

Seperti yang dinyatakan di atas, respon kebijakan energi tersebut terhadap *energy insecurity* yang meningkat di Asia Pasifik telah menciptakan dinamika interaksi berupa persaingan dalam meningkatkan keamanan energi dan jaminan terhadap impor minyak dengan cara mencari sumber pasokan baru – dimana mendapat dukungan kuat dari negara melalui bantuan militer, keuangan dan penguatan hubungan politik - mengontrol pembelian dan jalur transportasi disamping meningkatkan produksi nasional, yang telah menciptakan ketegangan di kawasan yang dapat mengarah pada konflik perebutan sumber daya alam.<sup>138</sup>

Permintaan minyak China yang tinggi akibat *economic boom* sejak negara ini mengadopsi sistem ekonomi kapitalis, tidak dapat diimbangi dengan pasokan dalam negeri China sehingga membawa konsekuensi berupa kebijakan ekspansi NOC China ke berbagai kawasan dunia dengan dukungan penuh dari pemerintah, sambil meningkatkan kapasitas produksi dalam negerinya, berpengaruh terhadap geopolitik energi - minyak khususnya - di kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan dengan negara-negara besar importer minyak. Hal ini dikuatkan oleh pernyataan Pablo Bustelo dalam sebuah

---

<sup>137</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

<sup>138</sup> Lihat dalam Pablo Bustel, "*China and The Geopolitic of Oil in The Asia Pacific Region*", *Elcano Royal Institute for International and Strategic Affairs Madrid*, <http://www.ucm.es/info/eid/pb/BusteloWPoil05eng.pdf>, hlm. 1. Diakses pada 24 Juni 2011, tentang persaingan dan perebutan oleh negara-negara besar importer minyak dalam menguasai sumber pasokan minyak yang memicu ketegangan dan mengarah pada konflik terbuka di kawasan Asia Pasifik, bandingkan juga dengan hasil analisis Mikkal E. Herberg, *Ibid.*, hlm. 367-372.

*working paper* berjudul *China and The Geopolitic of Oil in The Asia Pacific Region* :

“...China’s growing demand for oil is significantly changing the international geopolitics of energy, especially in the Asian Pacific region. The recent growth in oil consumption, combined with forecasts of increased oil imports (especially from the Middle East), have led to deep concern among Chinese leaders regarding their country’s energy security. They are responding in a number of different ways. In particular, they are determined to increase the security and reliability of oil imports by searching for new sources of supply, and to control purchases and transport lanes, while boosting national production at any cost. This is already causing tension and could lead to further disputes with the US and other big oil consumers, such as Japan and India, as well as with other Asian Pacific countries. However, enhanced cooperation among the big East Asian economies (China, Japan and South Korea) is also a possibility.”<sup>139</sup>

Geopolitik merupakan hubungan politik antarnegara yang dibentuk oleh posisi geografis<sup>140</sup> dimana mengukur signifikansi politis dan strategis suatu kawasan berdasarkan letak, ukuran, dan sumber daya alam yang dikandung<sup>141</sup>, serta berbicara tentang bagaimana hubungan antara kekuasaan negara dengan sumber daya alam yang ada membentuk kebijaksanaan negara yang tertuang dalam politik dalam dan luar negeri, serta upaya meningkatkan posisi dan kedudukan atau kapabilitas *power* negara berdasarkan perhitungan nilai strategis dari sebuah wilayah.

Salah satu teori geopolitik yang dikembangkan oleh Karl Haushoffer yaitu teori ruang. Menurutnya ruang adalah inti dari geopolitik. Ruang adalah dinamika dari politik dan militer.<sup>142</sup> Karena itu, geopolitik merupakan pemanfaatan ruang untuk membangun kekuatan politik ekonomi suatu negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Keinginan untuk menguasai dan

<sup>139</sup> *Ibid.*, hlm. 1. Diakses pada 24 Juni 2011.

<sup>140</sup> Colin S Gray, *The Geopolitics of Superpower* (Lexington, KY.:University Press of Kentucky, 1988), hal. 4., dalam M Kholid Syeirazi, *Op.Cit.*, hlm. 31.

<sup>141</sup> *Ibid.*

<sup>142</sup> Sri Hayati, Ahmad Yani, *Geografi Politik* (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 165.

mengontrol wilayah tertentu yang strategis sangat berpengaruh terhadap penyusunan kebijakan setiap negara.

Teori *World Island* dan *heartland* yang dikemukakan oleh Halford Mackinder dalam sebuah hipotesa yaitu siapa pun yang menguasai *heartland* (Rusia) akan menguasai wilayah *World Island* (wilayah Eurasia yang meliputi Eropa Timur, Asia Tengah, wilayah Kaukasus dan Afrika Utara), dan siapa yang menguasai wilayah *World Island* akan menguasai dunia.<sup>143</sup> Selain itu, merujuk pada teori Mackinder, Nicholas Spykman ahli geopolitik kebangsaan Amerika mengembangkan teori Rimland yaitu kawasan yang disebut Mackinder sebagai bulan sabit dalam (*inner crescent*) yang mencakup wilayah Finlandia, Timur Tengah, dan sekitar Asia Tengah. Secara strategis kawasan-kawasan diatas memiliki sumber cadangan energi minyak yang paling besar di dunia. Pandangan geopolitik klasik melihat perjuangan merebut dan menguasai daerah-daerah strategis sebagai inti dari politik internasional.

Pengaruh dari strategi dan kebijakan keamanan energi China terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik telah memicu ketegangan dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, karena paradigma neo-merkantilisme yang dipakai melalui peran NOC-nya dalam upaya mengamankan pasokan minyak, berpengaruh terhadap respon dari negara-negara importer besar lainnya dengan kebijakan yang kompetitif juga selain berpengaruh terhadap pasar internasional, seperti yang dikemukakan oleh Dorian seorang spesialis terkemuka dalam bidang energi internasional:

*“Rapid energy growth in China is leading to dramatic impacts throughout the world in terms of commodity markets and prices, and within China, growing thirst*

---

<sup>143</sup> Lihat Ermaya Suradinata, Alex Dinuth, *Geopolitik & Konsepsi Ketahanan Nasional* (Jakarta: Paradigma Cipta Yatsigama, 2001), hlm. 63-66.

*for energy is creating a new sense of urgency and energy insecurity. Indeed, the means by which Beijing chooses to deal with its energy security will not only affect the Chinese economy, but the global economy as well. China's energy needs have global implications today, as was witnessed last year through competition with Japan for imported oil from Russia. Ultimately the US, China, and Japan will be vying for the same Middle Eastern crude oil. Over the next two decades, China will play a larger and larger role in the Middle East since the country is so dependent on foreign oil imports, as well as Central Asia, West Africa, and other parts of the world which could help meet China's growing energy requirements.*"<sup>144</sup>

Pernyataan ini juga kembali dikuatkan oleh pernyataan Mikkal E. Herberg yaitu:

*"China's increasingly mercantilist strategy to assert control of oil and natural gas supplies and transport routes risks fueling tensions and conflict in a region where the lack of regional institutions to manage conflict is already a major problem and a region which is facing a sensitive transition to accommodate China's rising power over the next two decades. Energy competition is beginning to seriously aggravate existing and, in some cases, deepening rivalries between China and her neighbors..."*<sup>145</sup>

Meningkatnya kompetisi neo-merkantilisme di kawasan Asia Pasifik

– khususnya China yang menjalankan paradigma ini dalam menjamin keamanan energi China yang berpengaruh langsung pada kepentingan nasional China - dalam upaya mengamankan pasokan minyak dan rute transportasi yang memicu ketegangan dan konflik semakin membuat peran kerjasama keamanan energi dalam wadah organisasi regional menjadi semakin penting dalam politik energi khususnya minyak di kawasan Asia Pasifik. Karena itu, organisasi regional dan interregional seperti ASEAN, APEC dan OPEC serta lembaga lainnya menjadi penting perannya dalam mengatur hubungan geopolitik minyak di Asia Pasifik.

Organisasi internasional didefinisikan sebagai pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi jelas dan lengkap serta dihadapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna

<sup>144</sup> Pernyataan ini dikutip dalam Pablo Bustel, *Op.Cit.*, hlm. 3.

<sup>145</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda. (Rudy, 2002, 93-94).

Dapat dilihat bahwa diplomasi yang dimainkan negara-negara di kawasan Asia Pasifik telah menghubungkan energi, strategi dan kerjasama baik di bidang militer ekonomi maupun politik. China sendiri mengimplementasikan kedua strategi diplomasi tersebut dengan terlibat dalam aliansi atau blok-blok ekonomi di kawasan khususnya dengan negara-negara yang kaya sumber daya alam dalam mencapai kepentingan nasionalnya di bidang keamanan energi.

Meskipun pengaruh dari aktivitas kebijakan keamanan energi China ini menimbulkan persaingan merkantilisme baru di kawasan Asia Pasifik melalui kompetisi perusahaan minyak nasional, akan tetapi lewat ekspansi dari NOC China ini justru menjadi suatu peluang bagi China dalam menguasai pasar minyak internasional dan sarana memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara mitra kerjasama dalam bidang energi, yang semakin memperbesar pengaruh China di tingkat regional dan internasional dalam upayanya bangkit menjadi sebuah *major power*.

## **2. Hipotesis**

Setelah merumuskan kerangka teoritis di atas, langkah berikutnya adalah mengajukan hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan yang di dalamnya terdapat hubungan dua variabel atau lebih yang diuji secara empiris guna menentukan kesahihannya (reliabilitas). Hipotesis ini dirumuskan dengan proses logika

deduktif dan diuji melalui logika induktif. Seraya dikonsultasikan lewat preposisi, konsep, teori, dan asumsi yang berperan sebagai tolak acuan dalam mempelajari suatu fenomena yang menarik untuk diajukan penelitian.

Dari tatanan teori-teori dan konsep-konsep serta asumsi di atas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut:

*“Apabila China dapat menerapkan strategi politik neo-merkantilisme lewat peran CNPC sebagai NOC, maka akan semakin mendorong China menjadi major power yang kompetitif dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik.”*

### 3. Operasional Variabel dan Indikator (konsep, teoritik, empirik, dan analisis)

Adapun untuk memperjelas hipotesis di atas maka penulis memberikan operasionalisasi variabel untuk memberikan persepsi yang dimaksud atau adanya konsep dan variabel, sebagai berikut:

**Tabel 1.4**

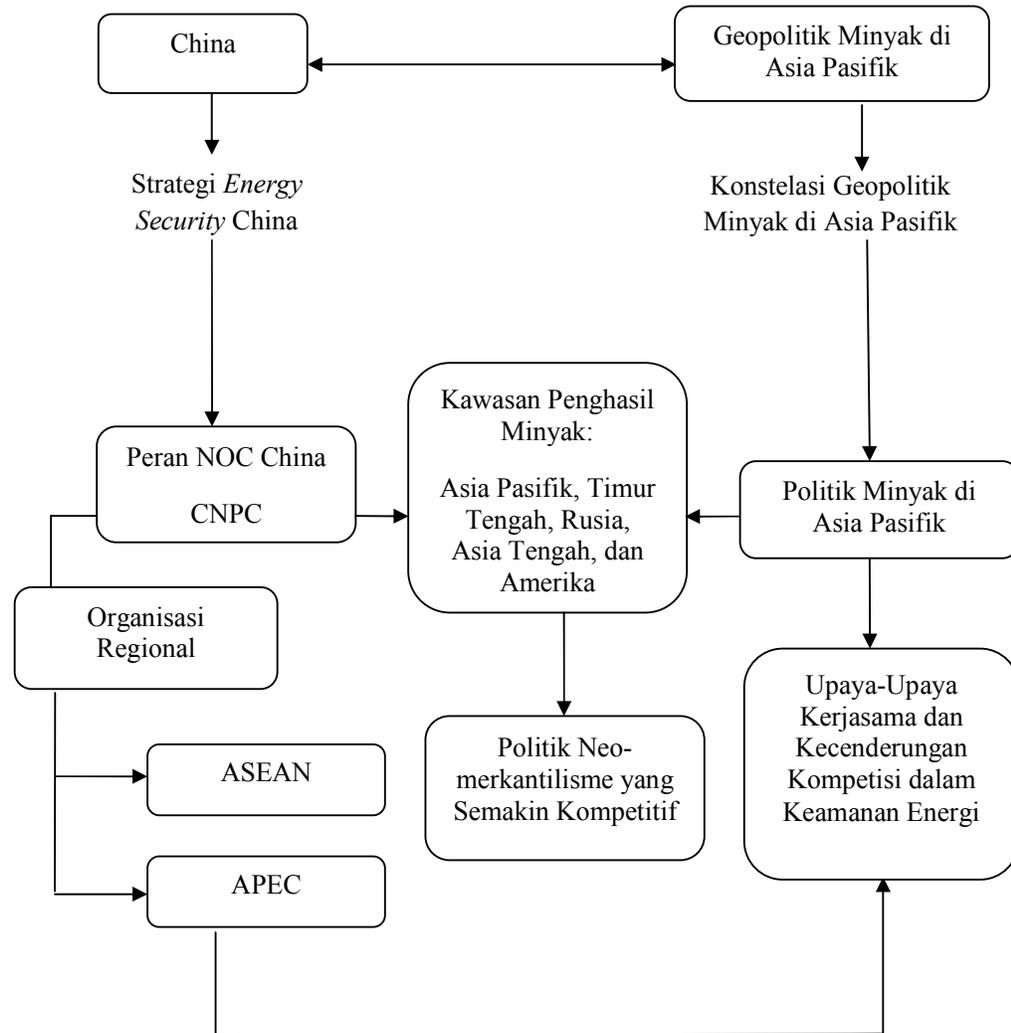
#### **Operasionalisasi Variabel dan Indikator**

<b>Variabel dalam hipotesis (Teoritik)</b>	<b>Indikator (Empirik)</b>	<b>Verifikasi (Analisis)</b>
<b>Variabel bebas: Apabila China dapat menerapkan strategi politik neo-merkantilisme lewat peran CNPC sebagai NOC</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya sejumlah dukungan pemerintah China baik politik maupun ekonomi bagi aktivitas NOC China di luar negeri.</li> <li>2. Adanya kontrol dari pemerintah China yang kuat terhadap NOC-nya.</li> <li>3. Adanya subsidi dari pemerintah China</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data-data mengenai bantuan baik politik maupun ekonomi dari pemerintah China untuk NOC China dalam menjalankan perannya di luar negeri.</li> <li>2. Data-data mengenai kontrol pemerintah China yang kuat terhadap NOC-nya.</li> <li>3. Data-data tentang</li> </ol>

	<p>bagi NOC-nya yang memungkinkan mereka mengalahkan pesaing-pesaing swasta.</p> <p>4. Adanya kegiatan bisnis NOC China dengan negara-negara yang tidak dapat dimasuki oleh perusahaan-perusahaan multinasional Barat.</p>	<p>sejumlah subsidi dari pemerintah China untuk NOC-nya.</p> <p>4. Data-data tentang kegiatan bisnis NOC China dengan negara-negara yang tidak dapat dimasuki oleh perusahaan-perusahaan multinasional Barat.</p>
<p><b>Variabel terikat: Maka akan semakin mendorong China menjadi <i>major power</i> yang kompetitif dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik</b></p>	<p>1. Adanya sejumlah kesepakatan kerjasama NOC China dalam bidang eksplorasi dan produksi, dengan negara-negara produsen minyak dan IOC, di Asia Pasifik dan kawasan lain.</p> <p>2. Adanya investasi langsung NOC China di negara-negara produsen minyak Asia Pasifik dan kawasan lain.</p> <p>3. Adanya kemitraan NOC China dengan NOC dan IOC dari negara lain dalam bidang eksplorasi dan produksi.</p> <p>4. Adanya prestasi NOC China sebagai salah satu produsen minyak penting dunia.</p> <p>5. Adanya keterlibatan aktif dari NOC China</p>	<p>1. Data-data mengenai MOU antara NOC China dengan sejumlah negara produsen minyak dan IOC di Asia Pasifik dan kawasan lain dalam bidang eksplorasi dan produksi.</p> <p>2. Data-data tentang FDI China di sejumlah negara produsen minyak Asia Pasifik serta kawasan lain.</p> <p>3. Data-data tentang kemitraan NOC China dengan NOC dan IOC dari negara lain dalam bidang eksplorasi dan produksi.</p> <p>4. Data-data tentang prestasi</p>

	<p>dalam kegiatan akuisisi di luar negeri.</p> <p>6. Adanya keterlibatan aktif dari NOC China dalam sejumlah pembangunan pipa migas di Asia Pasifik dan berbagai kawasan dunia.</p> <p>7. Adanya politik minyak di kawasan Asia Pasifik yang kompetitif.</p>	<p>NOC China sebagai salah satu produsen minyak penting dunia.</p> <p>5. Data-data tentang keterlibatan aktif dari NOC China dalam kegiatan akuisisi di luar negeri.</p> <p>6. Data-data mengenai keterlibatan aktif dari NOC China dalam sejumlah pembangunan pipa migas di Asia Pasifik dan berbagai kawasan dunia.</p> <p>7. Data-data tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan China dalam upaya-upaya kerjasama politik energi di Asia Pasifik, dan</li> <li>- Persaingan diantara China dan para <i>major player</i> dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik khususnya dalam menguasai wilayah yang potensial akan minyak.</li> </ul>
--	--	---

#### 4. Skema Kerangka Teoritis



#### E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

##### 1. Tingkat Analisis

Dalam penulisan skripsi ini, unit variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu: “Akan semakin mendorong China sebagai *major power* yang kompetitif dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik” akan dijadikan

sebagai unit analisis yang dikategorikan dalam tingkat analisa kawasan. Sedangkan, variabel independen yang dijadikan sebagai unit explanasi yaitu: “Apabila China dapat menerapkan strategi politik neo-merkantilisme lewat peran CNPC sebagai NOC”, akan digunakan penulis sebagai unit penjelas pada tingkat negara-bangsa.

Sehingga, dalam merangkai jenis hubungan tingkat analisis di dalam penulisan skripsi ini, digunakan tingkat analisis korelasionis yakni unit analisis kawasan dalam variabel terikat yang dipengaruhi secara koheren oleh unit explanasi negara-bangsa dalam variabel bebas.

## **2. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua bentuk metode penelitian yaitu:

- a) Metode deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan menggambarkan, menganalisa, dan mengklasifikasikan gejala-gejala atau fenomena-fenomena yang didasarkan atas hasil-hasil pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang tersedia di tengah-tengah realita yang ada. Data diorganisasikan secara sistematis untuk melukiskan fakta atau bidang tertentu secara faktual dan cermat, dalam pelaksanaannya metode ini tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan data saja tetapi meliputi analisa dan interpretasi data.
- b) Metode historis analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena atau kejadian di masa lampau secara generalis di dalam memahami situasi sekarang dan

kemungkinan dapat berkembang di masa yang akan datang berdasarkan sumber data sekunder.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dari :

- a) Studi kepustakaan (*Library Research*) yakni meneliti dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai bahan bacaan baik dari buku maupun dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Baik yang terdapat di perpustakaan maupun yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, badan-badan resmi maupun lembaga-lembaga lainnya maupun lewat media internet.

## **F. Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

#### **1) Departemen Luar Negeri Republik Indonesia**

Jl. Pejambon No.6. Jakarta Pusat, 10110 Indonesia.

#### **2) Kedutaan Besar Amerika Serikat**

Jl. Medan Merdeka Selatan 5, Jakarta 10110.

#### **3) Kedutaan Besar China**

Jl. Mega Kuningan No.2, Jakarta.

#### **4) Kedutaan Besar Jepang**

Jl. M.H. Thamrin No 24, Jakarta 10350.

#### **5) Kedutaan Besar India**

Jl. H.R. Rasuna Said, S-1, Kuningan Jakarta 12950.

#### **6) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM)**

Jl. Merdeka Selatan No. 18, Jakarta.

**7) Pertamina Pusat**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 1, Jakarta.

**8) Internasional Crisis Group**

Jl. M.H. Thamrin Kav. 3, Menara Tahmrin 14<sup>th</sup> Frloor Suite 1402  
Jakarta 10250.

**9) Central For Strategic International Studies (CSIS)**

Jl. Tanah Abang III No. 23-27, Jakarta Pusat.

**10) LIPI**

Widya Graha LIPI, Lantai XI Jl. Jend. Gatot Subroto 10 Jakarta  
12710.

**2. Lamanya Penelitian**

Pelaksanaan Penelitian ini dimulai pada awal bulan Januari 2011 sampai akhir bulan September 2011.

**G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah di dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis menguraikannya dalam bentuk bab-bab yang terdiri dari:

**BAB I Pendahuluan**

Bagian ini merupakan bagian pembuka suatu permasalahan yang diharapkan dapat menghantarkan pembaca untuk dapat memahami permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Di dalamnya meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis

dan hipotesis, metode dan teknik pengumpulan data, lokasi dan lamanya penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II Ketergantungan China Akan Minyak Dan Peran *National Oil Company China (CNPC)* Dalam *Energy Security China***

Dalam bab ini akan diuraikan tentang dinamika kebijakan *energy security* China, strategi politik minyak China, lembaga pembuat kebijakan dan pengelolaan energi China, serta peran CNPC dalam mengamankan pasokan minyak nasional China.

## **BAB III Konstelasi Geopolitik Minyak di Asia Pasifik**

Dalam bab ini diuraikan mengenai: kondisi *energy security* di Asia Pasifik, aktor utama dalam geopolitik minyak di Asia Pasifik, politik minyak AS di Timur Tengah dan Asia Tengah, wilayah perebutan sumber minyak di Asia Pasifik, konstelasi geopolitik minyak di Asia Pasifik: upaya-upaya kerjasama regional dan kecenderungan kompetisi dalam isu *energy security* di Asia Pasifik.

## **BAB IV Peran NOC China dan Pengaruhnya terhadap Geopolitik Minyak di Asia Pasifik**

Dalam bab ini membahas mengenai: *energy security* China dalam upaya mengatasi ketergantungannya terhadap energi, hubungan Pemerintah China dengan NOC-nya dalam mewujudkan *energy security*, peran dan tantangan NOC China dalam merepresentasikan kepentingan nasional China, konstelasi geopolitik minyak di Asia Pasifik terkait dengan strategi *energy security* China, dan signifikansi

NOC China dan pengaruhnya terhadap geopolitik minyak di Asia Pasifik.

## **BAB V Kesimpulan**

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.